

**KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

TESIS

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains



Oleh:

NAMA : HERRY SIMON
NPM : 187121034
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER ILMU ASMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

**KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

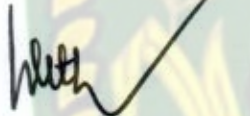
TESIS

Oleh :

**HERRY SIMON
NPM : 187121034**


TIM PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA

Sekretaris



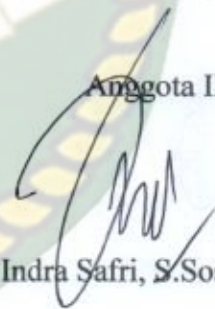
Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

Anggota I



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si

Anggota II



Indra Safri, S.Sos., M.Si

**Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

**KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

TESIS

Oleh :

Nama : **HERRY SIMON**
NPM : **187121034**
Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I

Pekanbaru, 29/09/20



Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., M.A

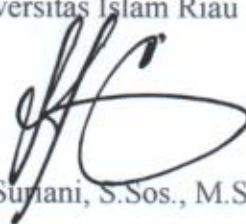
Pembimbing II

Pekanbaru, 29/09/20



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitas Islam Riau



Lilis Sunani, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik Peserta Ujian Komprehensif Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herry Simon
NPM : 187121034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Proposal Tesis : Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2020




Herry Simon



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 380/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Herry Simon
NPM : 187121034
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 16 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi.
Magister Ilmu Administrasi


Lilis Suriyani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 16 April 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

COORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN by Herry Simon



From Prodi. Ilmu Administrasi (Tesis 2)

- Processed on 16-Apr-2020 10:50 +08
- ID: 1298818485
- Word Count: 18189

Similarity Index

15%

Similarity by Source

Internet Sources:

14%

Publications:

2%

Student Papers:

11%

sources:

- 1 4% match (Internet from 28-Nov-2019)
http://djh.bulukumbakab.go.id/po-content/uploads/PERMENDAGRI_NOMOR_56_TAHUN_2019_TTG_PEDOMAN_NOMENKLATUR_SEK_PROV_DAN_SEK
- 2 2% match (Internet from 25-Oct-2017)
<http://repository.unpas.ac.id/31469/7/BAB%20II%20fix.pdf>
- 3 1% match (Internet from 08-Apr-2020)
<https://es.scribd.com/document/396119857/Administrasi-Dan-Administrasi-Negara>
- 4 1% match (Internet from 19-Mar-2019)
<http://repository.unpas.ac.id/41596/5/22-DES-BAB-3%20EDIT-TERBARU.pdf>
- 5 1% match (student papers from 14-Jun-2017)
Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri on 2017-06-14
- 6 1% match (Internet from 16-Feb-2020)
<https://issuu.com/metroriau/docs/15102015>
- 7 1% match (Internet from 30-Oct-2016)
<http://documents.tips/documents/bab-ii-56043a9257659.html>
- 8 1% match (Internet from 11-Jul-2019)
<http://repository.uir.ac.id/346/2/bab2.pdf>
- 9 1% match (Internet from 11-Sep-2019)
<http://repository.unpas.ac.id/43039/5/BAB%20II.pdf>
- 10 1% match (Internet from 22-Dec-2019)
<https://www.scribd.com/document/379191361/Mankep-Nia>
- 11 1% match (Internet from 16-Aug-2018)
<https://www.dpuprpelalawan.com/profil/visi-misi>
- 12 1% match (Internet from 13-May-2019)
<http://repository.unpas.ac.id/11784/4/4.%20BAB%20II%20%28Ana%20Sri%20Rahayu%20122010061%29.pdf>
- 13 1% match (Internet from 29-Jul-2018)
<http://djh-barutkab.org/uploads/1-2017-01-03-144422.pdf>



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA**

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 189/KPTS/PPs-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Herry Simon** tanggal 17 April 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., M.A	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **HERRY SIMON**
 N P M : **187121034**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi**
 Judul Tesis : **"KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 22 April 2020

Direktur

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
 NIP. 19540808 1987011 002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

HERRY SIMON

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan. Indikator yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Handyaningrat yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi serta Kontinuitas Perencanaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian gabungan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif yaitu peneliti menggunakannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam menganalisa fenomena yang diteliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, Koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan sudah berjalan dengan baik dikarenakan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan seluruh OPD dalam mengisi data-data yang dibutuhkan dalam LPPD. Berdasarkan indikator yang dijadikan dasar dalam penelitian masih ada ditemukan beberapa indikator yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan agar kualitas LPPD akan semakin jauh lebih baik.

Kata Kunci : Koordinasi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

**COORDINATION FOR PREPARATION OF REGIONAL GOVERNMENT
IMPLEMENTATION REPORT IN PELALAWAN REGENCY
IN THE REGIONAL SECRETARIAT OF PELALAWAN REGENCY**

ABSTRACT

HERRY SIMON

The purpose of this study was to learn how to coordinate the implementation of Pelalawan district government reporting at the Pelalawan District Regional Secretariat. The indicators used in this study use the theory put forward by Handyaningrat, namely Communication, Awareness of Important Coordination, Participant Competence, Agreement, Commitment and Commitment Incentives and Continuity of Planning. The location of the study was conducted at the Regional Secretariat of Pelalawan Regency. This type of research used by researchers is a combination of research methods and quantitative research methods that researchers use to get a clearer picture in analyzing phenomena related to using data collection techniques, namely questionnaires, interviews, observations and investigations. Based on the results of research conducted by researchers, the Coordination made the Report on the Implementation of the Regional Government of Pelalawan Regency has carried out its duties well and carried out its duties as coordinator in coordinating all OPDs in filling out the data needed in LPPD. Based on the indicators that are based on the research, there are still some indicators that actually can still improve the quality of LPPD, which will get even better.

Keywords: Coordination, Regional Government Implementation Report (LPPD)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **“KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN”** ini tepat pada waktunya. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat penulisan tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril dan materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Kepada bapak yang sudah di surga, mama , kakak, abang dan adik yang selalu memberikan semangat terhadap penulis agar dapat menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E, M.A dan Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala waktu dan bimbingan yang telah Bapak berikan kepada penulis.

5. Direktur, Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan Universitas Islam Riau yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, yang telah membantu penulis dalam proses penelitian untuk mendapatkan informasi dan data – data terkait .
7. Sahabat-sahabat penulis,,teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, serta rekan sekantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan tesis ini semata-mata karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik, saran serta masukan kearah perbaikan dan kesempurnaan proposal ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, April 2020
Penulis,

Herry Simon

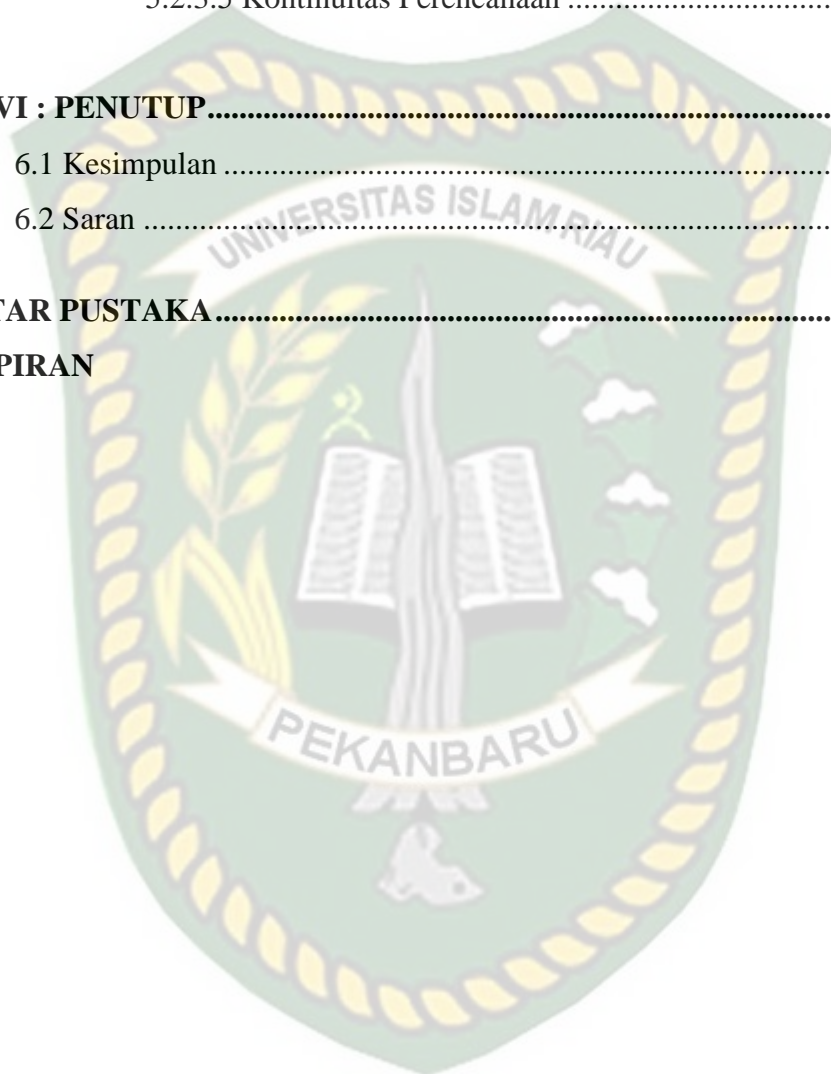
DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik	13
2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik	15
2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik	18
2.1.4 Konsep dan Teori Tata Kelola Pemerintahan	21
2.1.5 Konsep dan Teori Akuntabilitas	23
2.1.6 Konsep dan Teori Koordinasi.....	24
2.1.7 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	30
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pemikiran	34
2.4 Konsep Operasional.....	34
2.5 Operasional Variabel	36
2.6 Skala Pengukuran	37

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	39
3.1 Tipe/Jenis Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel.....	39
3.3.1 Populasi.....	39
3.3.2 Sampel.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
3.6.1 Analisis Data Kuantitatif.....	44
3.6.2 Analisis Data Kualitatif.....	45
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	48
 BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	 49
4.1 Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	49
4.2 Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.....	51
4.3 Fungsi dan Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.....	53
4.4 Sumber Daya.....	63
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 65
5.1 Gambaran Subjek Penelitian.....	65
5.1.1 Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin	65
5.1.2 Karakteristik Responden menurut Umur	66
5.1.3 Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan	67
5.2 Analisis Data dan Hasil Penelitian.....	67
5.2.1 Uji Validitas	67
5.2.2 Uji Realibilitas	68
5.2.3 Analisis Data tentang Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan.....	69
5.2.3.1 Komunikasi.....	70

5.2.3.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi.....	75
5.2.3.3 Kompetensi Partisipan.....	82
5.2.3.4 Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi.....	87
5.2.3.5 Kontinuitas Perencanaan	92

BAB VI : PENUTUP.....	107
6.1 Kesimpulan	107
6.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1.1 Daftar Nilai dan Skor LPPD se-Provinsi Riau.....	3
1.2 Jadwal Pelaksanaan Penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	32
2.2 Konsep Operasional Variabel	36
2.3 Skala Pengukuran.....	38
3.1 Daftar Populasi.....	40
3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	48
4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan	50
4.2 Daftar Pegawai Bagian Pemerintahan dan Kerjasama.....	63
5.1 Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin.....	65
5.2 Karakteristik Responden menurut Umur	66
5.3 Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan	67
5.4 Uji Validitas Koordinasi	68
5.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	69
5.6 Analisis Tanggapan responden tentang indikator Komunikasi	71
5.7 Jumlah Indikator Kinerja Kunci pada setiap OPD.....	73
5.8 Analisis Tanggapan responden tentang indikator kesadaran pentingnya koordinasi.....	76
5.9 Analisis Tanggapan responden tentang indikator Kompetensi Partisipan....	83
5.10 Analisis Tanggapan responden tentang indikator kesepakatan, komitmen dan insentif Koordinasi	88
5.11 Analisis Tanggapan responden tentang indikator Kontinuitas perencanaan	93
5.12 Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Pelalawan.....	96
5.13 Capaian Kinerja Dinas PUPR Tahun Anggaran 2017 dan 2018	98
5.14 Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2018	101
5.15 Rekapitulasi tanggapan responden tentang Koordinasi Penyusunan LPPD .	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
2. 1 Kerangka Pikir Evaluasi Penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan.....	34
4. 1 SOTK Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Pelalawan	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari dari penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan desentralisasi mempunyai tujuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran Pemerintah Pusat dalam kerangka Otonomi Daerah adalah menentukan kebijakan secara makro, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan otonominya dengan optimal. Sedangkan Pemerintah Daerah akan langsung terhadap tataran pelaksanaan otonomi. Tugas dan Kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah haruslah dipertanggungjawabkan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 sampai pasal 74 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dinyatakan bahwa apabila kepala daerah tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Dalam Negeri dan apabila sanksi yang sudah disampaikan 2 kali berturut-turut tidak ditanggapi maka kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Kementerian dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya untuk secara rinci dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

Ruang lingkup LPPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari penyelenggaraan:

1. Urusan Desentralisasi, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan
2. Tugas Pembantuan, meliputi tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan kepada desa.
3. Tugas Umum Pemerintahan
4. Indikator Kinerja Kunci
 - a. Tataran Pengambil Kebijakan
 - b. Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum)
 - c. Tataran Pelaksana Kebijakan (Urusan Pemerintahan)

Berdasarkan permendagri nomor 73 tahun 2009 menjelaskan bahwa prinsip dasar EKPPD dilaksanakan berdasarkan 6 indikator yaitu: spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur dapat diperbandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Spesifik sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah. Obyektif sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Terukur sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memanfaatkan data

kuantitatif dan atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif. Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah. Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD yang dikirim oleh Kepala Daerah secara tranparan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah di Indonesia sampai saat ini masih sedikit pemerintah daerah yang mendapat predikat terbaik. Berdasarkan hasil gabungan secara nasional hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri, Kabupaten Pelalawan masih mendapat hasil yang masih naik turun yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nilai dan Skor LPPD Se-Provinsi Riau

Nama Pemda	2017 ^{a)}		2016			2015	
	Skor	Prestasi	Skor	Prestasi	Rank Nas	Skor	Prestasi
Kab. Kampar	2,9703	T	2,9642	T	214	3,0175	ST
Kab. Bengkalis	3,0110	ST	3,0093	ST	187	2,8096	T
Kab. Siak	3,1620	ST	3,2401	ST	74	3,2582	ST
Kab. Rokan Hulu	2,8397	T	2,9097	T	233	N/A	N/A
Kab. Indragiri Hilir	2,9377	T	2,7722	T	289	2,9497	T
Kab. Rokan Hilir	2,6170	T	2,8142	T	274	2,7608	T
Kab. Kuansing	2,8001	T	2,7084	T	310	2,8107	T
Kab. Pelalawan	2,8552	T	2,8746	T	249	3,0084	ST
Kab. Indragiri Hulu	2,9233	T	2,9958	T	196	2,7924	T
Kab. Kep. Meranti	2,7220	T	2,7631	T	294	2,6716	T
Kota Pekanbaru	3,2455	ST	3,0481	ST	51	2,8970	T
Kota Dumai	2,8698	T	2,8230	T	80	2,7275	T

Sumber : diolah dari hasil evaluasi LPPD Tahun 2019

Pada hasil EKPPD tahun Anggaran 2015 Kabupaten Pelalawan meraih peringkat 140 dari 384 Kabupaten yang terdapat di seluruh Indonesia dengan skor 3,0084 dan status Sangat Tinggi, untuk tahun Anggaran 2016 Kabupaten Pelalawan meraih peringkat 249 dari 397 Kabupaten yang terdapat di seluruh Indonesia dengan skor 2,8746 dan status Tinggi, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Pelalawan meraih peringkat 201 dari 396 Kabupaten yang terdapat di seluruh Indonesia dengan skor 2,8552 dan status Tinggi.

Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 memiliki Visi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yaitu “Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera)”. Inovasi Menuju Pelalawan EMAS berarti pembangunan yang didorong upaya, gerakan dan prakarsa inovatif menuju Kabupaten Pelalawan yang mandiri dalam ekonomi, aman dan sejahtera dalam kehidupan Sosial kemasyarakatan. Mandiri dalam ekonomi berarti memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk memberdayakan kemampuan dan sumberdaya daerah. Untuk mencapai visi Kabupaten Pelalawan maka ditetapkanlah 7 (tujuh) misi yaitu:

- I. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu;
- II. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan;
- III. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi;
- IV. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur;
- V. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa;

- VI. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan;
- VII. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan.

Arah kebijakan pembangunan tahunan difokuskan pada pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 – 2021, yakni :

1. Pelalawan Sehat yakni Upaya intensif menciptakan kondisi sehat masyarakat dan lingkungan dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, pencegahan pencemaran lingkungan, kebakaran lahan dan hutan, meningkatkan layanan penyediaan air minum layak dan sanitasi layak serta penanganan kawasan kumuh;
2. Pelalawan Cerdas yakni Upaya memperkuat pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan untuk semua, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas Guru dan peningkatan proses belajar mengajar;
3. Pelalawan Terang yakni Upaya peningkatan elektrifikasi rumah tangga dan pemanfaatan sumberdaya listrik dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan memfasilitasi pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan listrik sampai ke pelosok;
4. Pelalawan Lancar yakni Upaya memperkuat dan memperluas pembangunan prasarana perhubungan untuk menciptakan lancarnya arus orang dan barang;
5. Pelalawan Makmur yakni Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM serta upaya-upaya pengentasan kemiskinan;
6. Pelalawan Eksotis yakni Upaya mewujudkan Kabupaten Pelalawan yang eksotis sebagai tujuan wisata nasional dan dunia dengan mengembangkan Eko Wisata Bono berbasis masyarakat sebagai ikon utama, ditunjang objek wisata pendukung lainnya;
7. Pelalawan Inovatif yakni Upaya meningkatkan daya saing daerah melalui pendekatan inovatif dengan membangun kawasan teknopolitan sebagai simpul dari jaringan inovasi Pelalawan, Riau dan Sumatera.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, sehingga tupoksi Sekretariat Daerah sangatlah berkaitan dengan keberhasilan kinerja dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan. Salah satu yang menjadi sasaran strategis dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 dalam Misi V yang tertuang dalam indikator sebagai berikut:

1. Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Nilai LPPD
3. Peringkat LPPD
4. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja

Mekanisme penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan masih berpedoman dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, dan format yang terdapat dalam LPPD adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang dasar hukum pembentukan daerah, gambaran umum daerah, kondisi geografis daerah, gambaran umum demografis dan kondisi ekonomi.
- b. Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam bab ini berisi tentang visi dan misi, strategi dan arah kebijakan publik serta prioritas daerah.
- c. Bab III Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan Pemerintahan Umum, dalam bab ini berisi

tentang ringkasan urusan dari organisasi perangkat daerah yang ada di daerah.

- d. Bab IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dalam bab ini berisi penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan RKP.
- e. Bab V Tugas Pembantuan, berisi mengenai tugas pembantuan yang diterima mulai dari dasar hukum, sumber dan jumlah anggaran, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan serta hal –hal yang perlu dilaporkan .
- f. Bab VI Tugas Umum Pemerintahan, berisi tentang kerjasama antar daerah atau pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- g. Bab VII Penutup, berisi mengenai penutup dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama dalam penyusunan LPPD ini membentuk sebuah tim dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Asisten Administrasi Pemerintahan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pelalawan
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
5. Kepala Bagian Hukum

6. Kepala Bagian Program Pembangunan
7. Kepala Bidang Informasi dan Dokumentasi BKD
8. Kasubid evaluasi dan dokumentasi BKD
9. Kasubbag Dokumentasi Hukum
10. Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan OTDA
11. Kasubbag Perundang-undangan
12. Kasubbid data dan pelaporan BAPPEDA
13. Staf Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
14. Staf BPKAD
15. Staf Bagian Hukum

Tim penyusun LPPD memiliki tugas menyusun dan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan LPPD, adapun agenda penyusunan LPPD tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan

No	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembelajaran pedoman penyusunan LPPD	Minggu Pertama Bulan Januari
2.	Penyusunan Draft SK Tim	Minggu Kedua Bulan Januari
3.	Rapat Pembentukan Tim LPPD	Minggu Kedua Bulan Januari
4.	Pengumpulan data dan informasi pendukung penyusunan LPPD	Minggu Ketiga Bulan Januari hingga minggu Keempat Bulan Februari
5.	Penyusunan Draft LPPD	Minggu Pertama Bulan Februari hingga Minggu Kedua Bulan Maret
6.	Penyempurnaan Draft dan Input data LPPD	Minggu Pertama Bulan Maret hingga minggu ketiga Bulan Maret
7.	Penjilidan Buku LPPD	Minggu Ketiga Bulan Maret
8.	Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri yang diwakilkan kepada Gubernur	Minggu Ketiga Bulan Maret sampai Minggu Keempat Bulan Maret
9.	Evaluasi dan monitoring hasil penyusunan LPPD	Bulan Maret hingga Bulan Juni
10.	Mengikuti evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Daerah dan Tim Nasional	Bulan Juni hingga Bulan Agustus

Sumber : diolah dari agenda Penyusunan LPPD Kab. Pelalawan, Tahun 2018

Dalam penyusunan LPPD ini Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama melalui Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan OTDA memiliki tugas sebagai kompilasi dan penyaring data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah hingga selesai. Namun tugas ini dapat terkendala dikarenakan lambatnya data-data yang diberikan oleh masing-masing OPD dan masih adanya yang kurang mengerti tentang data yang diminta, sehingga dalam penyusunan LPPD terkendala yang membuat hasil dari penyusunan tersebut kurang maksimal.

Oleh karena itu, penyusunan LPPD ini juga tidak terlepas dari bantuan oleh seluruh Perangkat Daerah, dikarenakan data dan informasi pendukung penyusunan LPPD merupakan gabungan data dari seluruh perangkat daerah sehingga apabila perangkat daerah yang lama dalam mengumpulkan datanya maka akan berpengaruh terhadap penyusunan LPPD. Pengaruh kesadaran dari Pimpinan Perangkat Daerah juga menjadi poin yang penting dalam penyusunan LPPD, kepedulian Pimpinan Perangkat Daerah dalam memberdayakan Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawainya berpengaruh dalam penyusunan LPPD. Selanjutnya dikarenakan LPPD ini disusun pada awal tahun yang berpapasan dengan penyusunan LKPJ, LAKIP, Laporan Keuangan, dan Laporan lainnya sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra terlebih permasalahan yang terjadi pada perangkat daerah dalam penyusunan Laporan tersebut dibebankan hanya pada satu orang saja yaitu pada kasubag program dan keuangan, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penyusunan LPPD. Selanjutnya dalam hal Sumber Daya Manusia, terjadinya mutasi jabatan juga berpengaruh dengan

terhambatnya data yang dikumpulkan, dikarenakan pejabat yang baru terkadang tidak mengerti dengan data yang diminta dan terkadang data yang diminta dibawa oleh pejabat sebelumnya.

Berdasarkan fenomena dan wawancara awal yang dilakukan terhadap kasubbag administrasi pemerintahan dan OTDA bapak T. Muslim Hidayat dalam penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan masih dijumpai beberapa masalah antara lain adalah:

1. LPPD Kabupaten Pelalawan belum menunjukkan capaian kinerja yang meningkat. Hal ini dibuktikan bahwa masih adanya Indikator Kinerja Kunci dalam LPPD Kabupaten Pelalawan yang angkanya tetap setiap tahun tanpa adanya perubahan bahkan masih ditemukan yang menurun meskipun tidak ditemukan lagi yang berstatus TDI atau tidak teridentifikasi.
2. Masih terhambatnya pengumpulan data dari perangkat daerah sehingga dalam program penyusunan LPPD menghambat tim penyusun dalam mengkompilasikan data-data secara akurat dan cepat dari perangkat daerah.
3. Masih ditemukan personil perangkat daerah yang tidak menyimpan data yang dibutuhkan dikarenakan terjadi mutasi jabatan di perangkat daerah yang terjadi pada akhir tahun. Sehingga tim penyusun harus menerangkan atau menjelaskan kembali data-data yang dibutuhkan dari perangkat daerah terkait.

4. Personil dari perangkat daerah cenderung mulai aktif dalam pengisian data-data LPPD saat data-data tersebut harus dikumpulkan atau saat Tim Penyusun sudah menyurati perangkat daerah beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap IKK-IKK yang terdapat pada perangkat daerah tersebut dan usaha peningkatan capaian kinerja. Sehingga yang sebenarnya dilaporkan berupa outcome namun sekarang data yang dilaporkan masih berupa output.
5. LPPD Kabupaten Pelalawan cenderung kurang mendapat perhatian dari unsur pimpinan perangkat daerah dikarenakan terdapat duplikasi permintaan laporan atau data yaitu berupa LKPJ, RENJA, LAKIP, Laporan Keuangan serta laporan lainnya. Sehingga yang seharusnya LPPD ini menjadi induk segala Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dapat berjalan optimal.

Sesuai dengan fenomena diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang merupakan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama dalam rangka penyusunan tesis dengan mengambil judul **“KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana proses koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diterima mahasiswa selama belajar Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau. Selain itu dengan penelitian ini penulis mampu mengetahui Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan.

b. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu sumber kepustakaan untuk penelitian lanjutan dengan masalah yang terkait.

c. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan yang dapat bermanfaat bagi pemikiran pembaca dan dapat bermanfaat baik bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep dan Teori Administrasi Publik

Administrasi merupakan usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan. Administrasi dalam arti sempit dapat diartikan suatu kegiatan yang meliputi bersifat teknis ketatatusahaan. Sedangkan dalam arti luas adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara yang memberikan daya guna dan hasil guna.

Menurut Sondang P. Siagian dalam Syafie, 2003:5 administrasi adalah Keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Melalui pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa administrasi adalah proses kegiatan yang dilakukan dua orang manusia atau lebih yang berkerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk dilaksanakan secara tepat sasaran sesuai dengan keputusan-keputusan yang dibuat bersama.

Selanjutnya administrasi juga memiliki ciri-ciri pokok yang disampaikan oleh Silalahi yaitu:

1. Sekelompok orang; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang;
2. Kerja sama; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama;

3. Pembagian kerja; adalah kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas;
4. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses; adalah kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan;
5. Tujuan; adalah sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.
(Silalahi, 2011:10)

Berdasarkan ciri-ciri administrasi yang terdapat di kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sekelompok orang merupakan ciri terutama dalam administrasi. Administrasi akan berjalan apabila terdapat sekelompok orang kemudian melaksanakan suatu kerjasama yang dibutuhkan. Hasil dari kerjasama itu adalah terdapat pembagian kerja yang jelas sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara runtut dalam suatu proses yang melewati tahapan-tahapan yang saling berhubungan selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan maka tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai.

Selanjutnya unsur-unsur administrasi menurut Anggara (2012:29) menyebutkan:

1. Organisasi;
2. Manajemen;
3. Komunikasi;
4. Kepegawaian;
5. Keuangan;
6. Perbekalan;
7. Tata Usaha;
8. Hubungan Masyarakat.

Seluruh proses administrasi tidak akan lepas dari unsur-unsur sebagaimana kutipan di atas, dikarenakan unsur-unsur tersebut saling berkaitan antara satu dan yang lain, apabila ada salah satu unsur yang tidak ada, proses administrasi akan tidak berjalan mulus. Selanjutnya administrasi dalam pengertian

administrasi negara juga memiliki ciri-ciri yang disebutkan Thoha (2008:36-38), sebagai berikut:

1. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari;
2. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan;
3. Administrasi negara mempunyai prioritas;
4. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas;
5. Pimpinan atasnya bersifat politis;
6. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit ditukar;
7. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Menurut Waldo dalam Syafiie (2003:33) mengemukakan bahwa “Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”. Sedangkan menurut Siagian (2008:7) mengemukakan bahwa “Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kerjasama dalam mendorong seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan dan penyelenggaraan suatu organisasi pemerintah.

2.1.2 Konsep dan Teori Organisasi Publik

Sekelompok orang mendirikan organisasi pasti mempunyai maksud agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai melalui tindakan dengan menjalankan kerja sama. Berdirinya organisasi dapat membantu mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien dengan cara yang dilakukan bersama-sama. Selain itu organisasi dapat berjalan lancar apabila seluruh anggota yang terdapat dalam organisasi mengerti dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Atmosudirdjo dalam buku Wursanto (2005:53) mendefinisikan organisasi itu sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan yang tertentu. Sedangkan organisasi menurut Manullang (2009:59) menyatakan bahwa “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya Manullang (2009:61) menyatakan bentuk organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk Organisasi Garis, sering juga disebut organisasi militer.
- b. Bentuk Organisasi Fungsional, pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap pimpinan berhak memberi komando kepada bawahan
- c. Bentuk Organisasi Garis dan Staf, pada umumnya dianut oleh organisasi besar.
- d. Bentuk Organisasi staf dan fungsional, merupakan gabungan antara bentuk fungsional dan bentuk garis dan staf.

Sedangkan menurut Etzioni dalam bukunya Silalahi (2011:125) organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Organisasi menurut Siagian (2008:6) adalah sebagai berikut: “Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pengertian/definisi organisasi terdiri dari:

- a. Sekelompok orang
- b. Tujuan bersama
- c. Kerjasama

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud organisasi adalah setiap bentuk perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki suatu tujuan bersama dan mencapainya dengan bekerja sama. Organisasi dapat dinyatakan juga sebagai wadah atau tempat bagi sekelompok orang untuk bekerjasama secara sistematis, terencana, adil dalam pembagian pekerjaan, terkendali dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sarana-prasarana dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan secara efektif dan efisien.

Organisasi dengan sistem terbuka dapat digambarkan seperti fenomena nyala api lilin, sinar yang dipancarkannya akan memengaruhi kondisi lingkungan di sekelilingnya. Daniel Griffiths mengatakan bahwa organisasi (sistem) berada dalam lingkungan (suprasistem) yang didalamnya memuat pula sub sistem (perangkat administrasi dalam organisasi). Batasan antar sub sistem dibuat dengan garis putus-putus yang berarti antar bagian dapat saling menembus (permeable).

Antara subsistem yang terlibat dapat saling mempengaruhi lewat hubungan yang interaktif dan adaptif antar komponen. Masalah yang terjadi pada satu bagian dapat menjadi ancaman terhadap fungsi keseluruhan. Adapun karakteristik dari sistem tertutup adalah adanya kecenderungan yang kuat untuk bergerak mencapai suatu keseimbangan dan entropi yang statis. Sifat ini menunjukkan adanya kebekuan atau tepatnya keseimbangan yang beku. Istilah entropi aslinya dipergunakan dalam ilmu-ilmu fisika. Ia mempunyai pengertian dipergunakan pada setiap sistem yang tertutup dengan tidak adanya potensi berikutnya untuk membangkitkan daya kerja atau usaha transformasi.

Selanjutnya dalam suatu organisasi memerlukan sistem manajemen yang efektif sehingga dibutuhkan struktur organisasi yang jelas, menurut antar tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Siswanto (2005: 85) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Struktur organisasi ini diperlukan agar setiap pekerja mengetahui yang harus dikerjakannya, selanjutnya melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

2.1.3 Konsep dan Teori Manajemen Publik

Aktivitas manajemen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kerjasama organisasi dikarenakan manajemen mampu mengoptimalisasikan dan mengintegrasikan setiap usaha-usaha yang dilakukan anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Siagian (2008:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Handoko (2009:8) menyatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah alat pelaksana utama administrasi dan juga sebagai seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Wirjana (2007:11) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana orang-orang yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi, menyelesaikan tugas-tugas melalui upaya-upaya orang lain dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2015:17) mendefinisikan manajemen adalah “suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Selain itu G.R Terry juga mengemukakan fungsi manajemen yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian, sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. Penggerakan, untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. Pengawasan, untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, Penggerakan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek dasar dalam pelaksanaan manajemen, sedangkan fungsi penggerakan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Kemudian pengawasan berhubungan dengan apakah penggerakan

yang sudah dibuat sudah sesuai dengan rencana dan untuk melihat apakah yang telah dilakukan sudah efektif dan efisien.

Menurut **Fayol** dalam **Hasibuan (2011:9)** asas – asas umum manajemen (*general principles of management*) adalah:

1. *Division of work* (asas pembagian kerja)
2. *Authority and responsibility* (asas wewenang dan tanggung jawab)
3. *Discipline* (asas disiplin)
4. *Unity of command* (asas ketahuan perintah)
5. *Unity of direction* (asas kesatuan jurusan atau arah)
6. *Subordination of individual interest into general interest* (asas kepentingan umum diatas kepentingan pribadi)
7. *Remuneration of personnel* (asas pembagian gaji yang wajar)
8. *Centralization* (asas pemusatan)
9. *Scalar of chain* (asas hierarki atau rantai berkala)
10. *Order* (asas keteraturan)
11. *Equity* (asas keadilan)
12. *Initiative* (asas inisiatif)
13. *Espirit de corps* (asas kesatuan)
14. *Stability of turn-over personnel* (asas kestabilan masa jabatan)

2.1.4 Konsep dan Teori Tata Kelola Pemerintahan

Menurut **Mardiasmo (2005:114)** mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat“.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2004: 18), karakteristik pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi:

- a. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
- e. *Consensus of orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

2.1.5 Konsep dan Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.

Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (answerability), dan (2) konsekuensi (consequences). Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi

mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan di dalam organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator dan para pelaksana di lapangan. Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan public accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien.

2.1.6 Konsep dan Teori Koordinasi

Koordinasi memiliki tujuan untuk integrasi, sinkronisasi, dan menyelaraskan kegiatan pengelolaan bersama agar berjalan secara insentif namun tidak keluar jalur. Selain itu bertujuan untuk memelihara suasana kerja dan sikap saling responsif dikalangan unit kerja yang berubah-ubah. Sehingga dari koordinasi inilah maka akan didapatkan suatu penyampaian informasi yang jelas,

komunikasi yang tepat dan pembagian kerja yang sesuai dengan wewenang yang telah diberikan atau diterima.

Menurut Hani Handoko 2003: 195, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidangbidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Selanjutnya G.R Terry dalam Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:291): Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah proses kesepakatan bersama dan menyelaraskan seluruh kegiatan dan unsur yang berbeda-beda sehingga tindakan yang dilaksanakan

seragam dan harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lainnya.

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), bentuk Koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi Horizontal, adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
- b. Koordinasi Vertikal, adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.
- c. Koordinasi Fungsional, adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Menurut Handyaningrat (1989:118) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama, dikarenakan kerjasama merupakan syarat utama dari koordinasi.

- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Selanjutnya tujuan koordinasi menurut Ndraha (2003:295), yaitu:

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Handyaningrat (1989:129) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)

Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas.

2. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional

Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando).

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain:

- a. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
- b. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
- c. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
- d. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
- e. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelitbelit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.

- f. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
- g. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

Handyaningrat (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

1. Komunikasi.
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subjek pembangunan
 - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

2.1.7 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 sampai pasal 74 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dinyatakan bahwa apabila kepala daerah tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Dalam Negeri dan apabila sanksi yang sudah disampaikan 2 kali berturut-turut tidak ditanggapi maka kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya untuk secara rinci dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Selanjutnya amanat Peraturan Pemerintah ini adalah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.

Laporan dimaksud bertujuan untuk mempermudah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Laporan yang dimaksud disampaikan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi paling lambat akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ruang lingkup dalam penyusunan LPPD terdiri dari:

1. Urusan Desentralisasi, yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Tugas Pembantuan
3. Tugas Umum Pemerintahan, meliputi kerjasama antar daerah/pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta tugas umum pemerintahan lainnya.
4. Indikator Kinerja Kunci yang terdiri dari: a. Tataran pengambilan kebijakan; b. Tataran pelaksana kebijakan (administrasi umum); dan c. Tataran Pelaksana kebijakan (urusan pemerintahan)

Selanjutnya format yang terdapat dalam penyusunan LPPD adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c. Bab III Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan Pemerintahan Umum
- d. Bab IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- e. Bab V Tugas Pembantuan
- f. Bab VI Tugas Umum Pemerintahan
- g. Bab VII Penutup

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel jurnal penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1. Arif Siswandi (2019) Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penyusunan LPPD belum terlaksana secara maksimal, baik dari kualitas data, komitmen pemimpin yang sangat kurang dan hasil laporan belum valid.	Menganalisis Penyusunan Laporan	Menggunakan model evaluasi CPIP.
2. Husnil Hayati Z (2014) Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan: Studi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	- Laporan Keuangan KESDM belum memenuhi semua ketentuan - Penyusun Laporan hanya sekedar melakukan kewajibannya dalam menyusun laporan dikarenakan Sumber daya manusia yang terbatas	Menganalisis Penyusunan Laporan	Menggunakan indikator sesuai Ketentuan di Perdijen 57/PB/2013

1	2	3	4
<p>3. Aria Ganesya (2014)</p> <p>Evaluasi Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah (studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Keuangan disusun menggunakan basis kas. - Masih perlu pengembangan dan pembenahan pada kendala-kendala yang sering muncul 	<p>Menganalisis Penyusunan Laporan</p>	<p>Menggunakan indikator sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.</p>
<p>4. Muh Andrianto E B S, SE (2019)</p> <p>Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar</p>	<p>Masih banyak para pelaki penyusun anggaran baik pada pihak eksekutif dari berbagai level manajemen maupun pihak legislatif yang belum benar-benar memahamai mengenai substansi anggaran kinerja.</p>	<p>Dalam pengumpulan data sama-sama menggunakan wawancara, observasi dan dokumen.</p>	<p>Pada penelitian ini lebih berfokus pada penyusunan anggaran dan alokasi anggaran belanja daerah.</p>
<p>5. Deby Fitriarsari, Dwi Martani, Rahfiani Khairurizka (2013)</p> <p>Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 terhadap PP No. 3/2007</p>	<p>Informasi yang paling sering tidak diungkapkan atau dilaporkan dalam LPPD adalah informasi mengenai jumlah dan jenis karyawan serta informasi mengenai permasalahan serta solusinya untuk setiap urusan atau tugas pemerintahan</p>	<p>Menganalisis tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada tingkat kesesuaian LPPD.</p>
<p>6. Esa Meutia (2015)</p> <p>Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang)</p>	<p>Dari aspek transparansi telah menyediakan media-media yang dapat digunakan oleh seluruh warga masyarakat untuk dapat mengakses serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	<p>Menganalisis mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pmda untuk menyampaikan informasi LPPD.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2019

2.4 Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindarkan kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dibuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian dan penyesuaian pada penyusunan LPPD, baik dari tim penyusun, maupun seluruh penyusun dari Perangkat Daerah yang membantu kelengkapan data penyusunan LPPD.

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan laporan yang disampaikan merupakan kondisi nyata dari kinerja pemerintah daerah.
3. Komunikasi, menunjukkan jalur informasi yang disampaikan dalam hal ini informasi mengenai pentingnya penyusunan LPPD.
4. Kesadaran pentingnya koordinasi, untuk menentukan tingkat pengetahuan tugas dan fungsi OPD untuk penyusunan dan kelengkapan data LPPD.
5. Kompetensi partisipan, keterlibatan kepala OPD dalam penyusunan dan kelengkapan LPPD masing-masing OPD.
6. Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi, untuk melihat komitmen masing-masing OPD dalam membantu penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan.
7. Kontinuitas perencanaan, tindak lanjut dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.2
Konsep Operasional Variabel Koordinasi Penyusunan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan di
Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Handyaningrat (1994:89)	Koordinasi penyusunan LPPD	Komunikasi	a. Penyampaian informasi b. Alur informasi c. Teknologi informasi
		Kesadaran pentingnya koordinasi	a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi b. Tingkat Ketaatan terhadap hasil koordinasi
		Kompetensi Partisipan	a. Pejabat yang berwenang terlibat b. Keterlibatan aparatur yang terlibat.
		Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi	a. Bentuk kesepakatan b. Pelaksana kegiatan c. Sanksi bagi pelanggar kesepakatan
		Kontinuitas perencanaan	a. Umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan b. Perubahan terhadap hasil kesepakatan

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019

2.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dengan alat ukur, sehingga dapat menghasilkan data kuantitatif. Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atau sekelompok orang digunakan skala likert (Sugiyono, 2007). Dengan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini skala Likert yang digunakan untuk Koordinasi yaitu: Sangat Baik (skor 5), Baik (skor 4), Cukup (skor 3), Kurang Baik (skor 2) dan Sangat Kurang Baik (skor 1).

Sebelum menganalisa deskriptif penelitian ini, akan di buat tabel rentang skala yang menjadi acuan dalam analisis deskriptif. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 30 responden dan banyaknya alternatif jawaban berjumlah 5 (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang Baik, Sangat Kurang Baik), maka:

- a. Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel x jumlah pertanyaan
- b. Skor tertinggi = bobot tertinggi x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

Sedangkan untuk menentukan rentang skala menggunakan rumus:

Rentang Skala (interval) = skor tertinggi – skor terendah / alternatif jawaban

Tabel 2.3
Skala Pengukuran

Variabel	Indikator	Skala	Rentang Skor	Kriteria Skor
Koordinasi penyusunan LPPD		5	1512 – 1800	Sangat Baik
		4	1224 – 1511	Baik
		3	936 – 1223	Cukup
		2	648 – 935	Kurang Baik
		1	360 – 647	Sangat Kurang Baik
	Komunikasi	5	378- 450	Sangat Baik
		4	306 – 377	Baik
		3	234 – 305	Cukup
		2	162 – 233	Kurang Baik
		1	90 – 161	Sangat Kurang Baik
	Kesadaran pentingnya koordinasi	5	252 – 300	Sangat Baik
		4	204 – 251	Baik
		3	156 – 203	Cukup
		2	108 – 155	Kurang Baik
		1	60 – 107	Sangat Kurang Baik
	Kompetensi Partisipan	5	252 – 300	Sangat Baik
		4	204 – 251	Baik
		3	156 – 203	Cukup
		2	108 – 155	Kurang Baik
		1	60 – 107	Sangat Kurang Baik
	Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi	5	378- 450	Sangat Baik
		4	306 – 377	Baik
		3	234 – 305	Cukup
		2	162 – 233	Kurang Baik
		1	90 – 161	Sangat Kurang Baik
Kontinuitas perencanaan	5	252 – 300	Sangat Baik	
	4	204 – 251	Baik	
	3	156 – 203	Cukup	
	2	108 – 155	Kurang Baik	
	1	60 – 107	Sangat Kurang Baik	

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe / Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*) antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode ini digunakan secara bersama dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam menganalisa fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisa tentang koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Pelalawan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama lokasi penelitian ini berdasarkan Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi, Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel, sebagai bagian dari populasi yang

digunakan untuk melakukan inferensi (pendekatan/penggambaran) terhadap populasi tempatnya berasal. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Daftar Populasi

No	Responden	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Drs. Tengku Mukhlis, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan	1
2	Drs. Zulhelmi, M. Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pelalawan	1
3	M. Hijrah, S.STP, M.Si	Tim Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1
4	Roby Ardelino, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	1
5	T. Muslim Hidayat	Kasubag Adm. Pemerintahan Umum OTDA	1
6	Penyusun LPPD di Organisasi Perangkat Daerah	Kasubag program dan keuangan	30
		Jumlah	35

3.3.2 Sampel

Penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus sesuai dengan yang disampaikan Sugiyono (2002:61-63) yang menyatakan bahwa: “sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus.” Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel menggunakan teknik sampling jenuh, seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah perolehan data secara langsung berupa informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan diungkapkan oleh informan yang menjadi objek penelitian. Data primer termasuk berupa transkrip hasil wawancara. Gambaran yang jelas mengenai penelitian didapatkan dengan diadakan wawancara langsung dengan informan penelitian dan responden penelitian mengenai Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Data sekunder adalah perolehan data tidak langsung seperti dari buku, makalah, media massa secara media cetak maupun media elektronik serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2008).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2011:174) menyatakan bahwa “pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Data yang diperlukan diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden. Dalam penelitian ini, responden yang diberikan kuesioner adalah PNS yang diberikan mandat oleh Kepala OPD untuk melengkapi data-data LPPD. Pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner berkaitan langsung dengan indikator variable penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari tim penyusun LPPD di setiap OPD.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai informan yang merupakan pihak diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Burns dalam Kumar (2011:144) *“an interview is a verbal interchange, often face to face, though the telephone may be used, in which an interviewer tries to elicit information, beliefs or opinions from another person”*. Sedangkan menurut Silalahi (2012:312) menjelaskan pengertian tentang wawancara sebagai berikut.

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil percakapan tersebut dicatat atau direkam oleh pewawancara.’

Adapun informan dalam kegiatan magang ini yang akan diwawancarai meliputi pihak-pihak yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Asisten Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, Tim Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Biro Pemerintahan Provinsi Riau), Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, Kepala Sub bagian administrasi pemerintahan dan OTDA.

3. Observasi

Menurut Kumar (2011:140) “ *Observation is one way to collect primary data. Observation is a purposeful, systematic and selective way of watching and listening to an interaction or phenomenon as it takes place*”. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Dokumentasi

Hasil penelitian dari wawancara dan observasi, akan lebih dapat dipercaya apabila disertai dengan bahan-bahan dan data tertulis serta foto-foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Arikunto (2010:274) mengemukakan bahwa, “Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang diperlukan oleh peneliti. Sedangkan menurut Merriam (2009:139) “*Documents are, in fact, a ready-made source of data easily accessible to the imaginative and resourceful investigators*”. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil adalah dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan penyusunan LPPD seperti lampiran data pendukung yang disampaikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Data Kuantitatif

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Validitas sebagai salah satu derajat ketepatan atau keandalan pengukuran instrumen mengenai isi pertanyaan (Sugiyono, 2012:124). Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien korelasi *Product Moment*. Cara mencari nilai korelasi adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dimana:

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

$\sum X$ = Jumlah skor item

$\sum Y$ = Jumlah total skor jawaban

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat total skor jawaban

$\sum XY$ = Jumlah perkalian skor jawaban suatu item dengan total skor

Syarat minimum untuk dianggap suatu butir instrumen valid adalah nilai indeks validitasnya $\geq 0,3$ (Sugiyono,2012:115) dan jika koefisien korelasi *Product Moment* $> r$ tabel. Oleh karena itu, semua pernyataan yang memiliki tingkat korelasi dibawah 0,3 harus diperbaiki karena dianggap tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012:130). Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan. Untuk uji reliabilitas digunakan metode *split half*, hasilnya bias dilihat dari nilai *Correlation Between Forms*. Jika r hitung $> r$ tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel atau membandingkannya dengan nilai *cut off point* 0,3 maka reliabel jika $r > 0,3$. Sebaliknya, jika r hitung $< r$ tabel maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel. Pengujian reliabilitas dengan *Alpha Cronbach* bisa dilihat dari nilai Alpha, jika nilai Alpha $> 0,6$ maka dapat dikatakan reliabel.

3.6.2 Analisis Data Kualitatif

Menurut Widi (2010:253) analisis data adalah proses pengumpulan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Nazir (2011:358) analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.

Analisis terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan selama kegiatan magang dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Mulyadi (2014:191), Silalahi (2012:339-340), dan Sugiyono (2014:246-253). Model interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyusunan analisis setelah proses pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Menurut Mulyadi (2014:192) “Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar”, yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan”. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak sehingga perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Selain itu semakin lama penelitian berlangsung maka semakin banyak data yang akan diperoleh sehingga akan semakin kompleks dan rumit. Kegiatan reduksi data merupakan usaha untuk membuat rangkuman hal-hal

yang inti atau pokok, dan tetap memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan spesifik untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, serta mencari data tambahan apabila diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan sejenisnya. Penyajian data merupakan suatu langkah penting agar tercapainya analisis yang akurat dan handal. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Selain itu juga mempermudah dalam memahami data dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam kegiatan analisis ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel. Sehingga kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dan mungkin saja tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan, oleh karena itu diharapkan penarikan kesimpulan penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke..																											
		Oktober 2018				November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x	x	x																				
2	Seminar UP									x	x																		
3	Riset											x	x																
4	Penelitian Lapangan													x	x														
5	Pengelolaan Dan Analisis Data															x	x												
6	Konsultasi Bimbingan Tesis																	x	x	x	x								
7	Ujian Tesis																					x							
8	Revisi Tesis																						x						
9	Penggandaan dan Penyerahan Tesis																										x	x	

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Pemerintah Kabupaten Pelalawan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar memiliki ibukota yang berkedudukan di Pangkalan Kerinci.

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.822,10 km², yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-Pulau kecil lainnya.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau Sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti;

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebelah Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

Wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki iklim tropis dengan kondisi topografi daerah yang mempunyai ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 m s.d 40 m. Daerah atau kota yang tertinggi adalah Langgam, Pangkalan Kerinci, Sorek I, Pangkalan Lesung, Ukui, dan Bandar Seikijang dengan tinggi masing-masing diatas 30 m dan yang terendah adalah Teluk Dalam dengan tinggi 2 m.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2018 adalah 369048 terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 191284 jiwa dan perempuan 177764 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 87023 jiwa dan terendah di Bunut 14813 jiwa.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Langgam	16362	14977	31339
2	Pangkalan Kerinci	44824	42199	87023
3	Bandar Sei. Kijang	10634	9850	20484
4	Pangkalan Kuras	29794	27740	57534
5	Ukui	19138	17794	36932
6	Pangkalan Lesung	14650	13556	28206
7	Bunut	7637	7176	14813
8	Pelalawan	10645	9400	20045
9	Bandar Petalangan	8073	7526	15599
10	Kuala Kampar	9451	8701	18152
11	Kerumutan	11924	11172	23096
12	Teluk Meranti	8152	7673	15825
TOTAL		191284	177764	369048

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan, 2019

4.2 Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan merupakan unsur staf yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memiliki tugas membantu Bupati untuk merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan serta melakukan pembinaan terhadap Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Perangkat Daerah lainnya.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati. Sekretaris Daerah memiliki Asisten yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum yang merupakan unsur staf Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Subbagian Fasilitasi dan Kerjasama.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a. Subbagian Bina Mental Spritual;
- b. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagian Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
- b. Subbagian Ekonomi Mikro Kecil; dan
- c. Subbagian Sumber Daya Alam

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Pengendalian Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
dan
- c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

- d. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
1. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Protokol;
 - b. Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Pelaporan.

4.3 Fungsi dan Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

1. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah,
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Instansi Daerah, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum. Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian, serta Dinas dan Badan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan kerja sama, kesejahteraan rakyat, hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas membawahi beberapa Bagian yaitu:

- a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang, dan jasa dan sumber daya alam. Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas dan Badan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa ;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa ;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan tugas membawahi beberapa Bagian yaitu:

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah dibidang organisasai;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah ;dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas

membawahi beberapa Bagian yaitu:

- a. Bagian Umum
 - b. Bagian Organisasi
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - d. Bagian dan Perencanaan Keuangan
5. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Administrasi Kewilayahan; dan Fasilitasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan fasilitasi kerja sama;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan fasilitasi kerja sama;
- c. perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan otonomi daerah, Administrasi Kewilayaan dan Fasilitasi Kerja sama dalam negeri;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama luar negeri;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan fasilitasi kerjasama Dalam Negeri ;

- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum serta fasilitasi kerjasama Luar Negeri; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas membawahi beberapa sub Bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencacatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. memfasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;
 - e. menyusun bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD);

- f. menghimpun Informasi Laporan Penyelemnggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- g. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- j. menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala daerah.

2) Subbagian Administrasi Kewilayaan

Kepala Subbagian Administrasi Kewilayaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
- b. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
- c. melaksanakan fasilitasi toponomi dan pemetaan wilayah;
- d. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
- e. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;

- f. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
dan
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan.

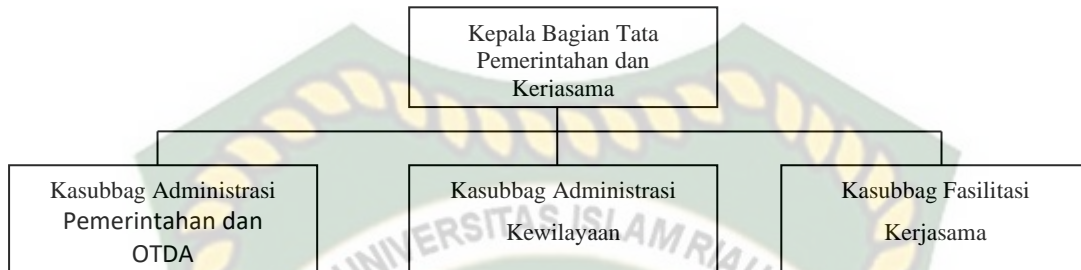
3) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama mempunyai tugas :

Kepala Subbagian Fasilitasi Kerja Sama mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian permusan kebijakan daerah dibidang kerja sama dalam negeri,kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama; dan
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama.

Gambar 4.1

**SOTK BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
SETDA KABUPATEN PELALAWAN**



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Pelalawan

4.4 Sumber Daya

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya aparatur yang dimiliki Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama sebagai berikut :

**Tabel 4.2
Daftar Pegawai Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama**

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	ROBY ARDELINO, S.STP, M.SI	Kepala Bagian
2	ILHAMMUDDIN	Kasubbag Administrasi Kewilayaan
3	T. MUSLIM HIDAYAT	Kasubbag Adm. Pemerintahan & OTDA
4	HERI SUMARDI	Kasubbag Fasilitasi Kerjasama
5	DJOKO PURNOMO, S.SOS, M.Si	Staf
6	AYU KARTIKA NASUTION, SE	Staf

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
7	MASNI, SE	Staf
8	DANANJAYA H.S, S.STP	Staf
9	HERRY SIMON, S.STP	Staf
10	ZULFIADI	Staf
11	TETI HASNAH	Staf
12	JAMAL	Staf
13	ABU HUROIROH	Staf
14	RISKA WIRDIANTI	Staf
15	SPRIANDY	Staf

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

Tersedianya sarana dan prasarana akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tupoksi dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Prasarana yang tersedia berupa sebuah bangunan sebagai kantor yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci sedangkan sarana perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Subjek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang memiliki jabatan sebagai kepala sub bagian program dan keuangan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Pelalawan sertda ditambah dengan 5 orang informan yang merupakan tim penyusun LPPD Kabupaten Pelalawan. Dengan penyebaran kuesioner sebanyak 30 responden dengan menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel. Sehingga total responden dalam penelitian berjumlah 35 responden. Karakteristik penelitian terdiri dari :

5.1.1 Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

Tabel 5.1

Karakteristik responden menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	23	66
2	Perempuan	12	44
		35	100

Sumber : Identitas Responden, 2020

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa mayoritas responden penelitian didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang dengan persentase 66 persen. Sementara responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 dengan persentase 44%. Dari data tersebut dapat disimpulkan

bahwa sebagian besar kasubbag program dan keuangan di Kabupaten Pelalawan serta sebagian tim penyusun LPPD mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

5.1.2. Karakteristik Responden menurut Umur

Tabel 5.2
Karakteristik responden berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	≤ 30	0	0
2	31 – 40	17	49
3	41 – 50	16	45
4	≥ 51	2	6
		35	100

Sumber : Identitas Responden, 2020

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas reponden penelitian didominasi responden yang berumur antara 31 - 40 tahun dengan jumlah 17 atau sebanyak 49 persen. Selanjutnya responden yang berumur antara 41 - 50 tahun dengan jumlah 16 orang atau sebanyak 45 persen, kemudian responden dengan umur antara ≥ 51 yang berjumlah 2 orang atau 6 persen. Kondisi ini menunjukkan responden berada pada usia produktif sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

5.1.3. Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 5.3
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	D3	0	0
2	S1	28	80
3	S2	7	20
		35	100

Sumber : Identitas Responden, 2020

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan strata S1 yakni sebanyak 28 orang atau sebesar 80 persen. Selanjutnya responden yang memiliki latar belakang S2 berjumlah 7 orang dengan persentase 20 persen.. Melalui data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi yaitu Strata 1.

5.2 Analisis Data dan Hasil Penelitian

5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan antar data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan agar dapat menentukan tujuan penelitian. Uji validitas Koordinasi penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan menggunakan teknik koefisien korelasi antara skor butir soal atau pertanyaan dengan skor total melalui uji dengan membandingkan nilai *Corrected item – total Correlation* (*r_{hitung}*) masing – masing item pertanyaan kuesioner dengan nilai *r_{tabel}* (0,05;n/2). Jika hasil *r_{hitung}* lebih besar dari *r_{tabel}*, maka item

pertanyaan valid. Untuk lebih jelas tentang hasil uji validitas Koordinasi penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut :

Tabel 5.4
Uji Validitas Koordinasi

NO	Nilai Corrected Item Total Correlation (rhitung)	r _{tabel}	Kriteria
1	0,629	0,361	Valid
2	0,653	0,361	Valid
3	0,664	0,361	Valid
4	0,808	0,361	Valid
5	0,808	0,361	Valid
6	0,688	0,361	Valid
7	0,680	0,361	Valid
8	0,613	0,361	Valid
9	0,680	0,361	Valid
10	0,613	0,361	Valid
11	0,680	0,361	Valid
12	0,782	0,361	Valid

Sumber: Data hasil Olahan SPSS versi 23

Berdasarkan tabel 5.4, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Koordinasi memiliki status valid dikarenakan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,361.

5.2.1 Uji Realibilitas

Uji realibilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dinyatakan reliable jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Adapun realibilitas untuk koordinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of pertanyaan	Crobach's Alpha	Syarat Minimal	Keterangan
Koordinasi	12	0,904	0,6	Reliabel

Sumber: Data hasil Olahan SPSS versi 23

Berdasarkan tabel 5.5, dapat diketahui bahwa uji realibilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Hasil koefisien realibilitas koordniasi sebesar 0,904, sehingga dari data tersebut nilai Alpha Crobach's lebih besar dari 0,6, yang membuktikan bahwa variabel tersebut reliable atau memenuhi persyaratan.

5.2.3 Analisis Data tentang Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan melibatkan seluruh komponen sehingga apabila terdapat salah satu komponen tersebut berjalan macet atau tidak turut serta dalam penyusunan LPPD maka akan berpengaruh terhadap kualitas isi dari Laporan tersebut. Komponen-komponen tersebut adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Pelalawan. Tahap penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan berawal dari bulan Januari sampai dengan akhir maret.

Penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan dikarenakan melibatkan berbagai pihak maka perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini bertindak sebagai koordinator dalam

penyusunan LPPD dibantu dengan Bagian teknis yaitu Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama. Sehingga fungsi Koordinasi yang dilaksanakan haruslah baik agar terlaksananya penyusunan LPPD yang berkualitas. Penulis dalam mengukur Koordinasi yang dilakukan terdapat 5 (lima) indikator yang membantu penulis dalam penelitian ini yaitu Komunikasi, Kesadaran pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi serta Kontinuitas Perencanaan. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Komunikasi yang tidak efektif dapat dikatakan sebagai akar semua permasalahan. Dalam penyusunan LPPD ini juga tidak akan terlepas dari komunikasi yang dilaksanakan, apabila komunikasi yang merupakan penyampaian informasi dari Tim Penyusun LPPD Kabupaten Pelalawan kepada OPD tidak berhasil mungkin dikarenakan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

Hasil dari data penelitian yang telah peneliti lakukan pada Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam tim penyusun LPPD pada masing-masing OPD yang sebagian besarnya juga memiliki jabatan sebagai kasubbag program dan keuangan, maka didapati tanggapan reseponden atau jawaban kuesioner yang disebarkan terhadap indikator komunikasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.6
Analisis tanggapan responden tentang Indikator Komunikasi

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Penyampaian Informasi	4	21	5	0	0	119
2	Alur Informasi pada masing-masing OPD	2	21	7	0	0	115
3	Penggunaan Teknologi Informasi	2	28	0	0	0	122
	Total Tanggapan	40	280	36	0	0	356
	Rentang Skor						306 - 377
	Kategori						Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Melalui tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pernyataan yang diajukan peneliti kepada 30 responden maka didapat 356 total jawaban tentang Komunikasi, sebanyak 40 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, 280 total tanggapan responden pada skala baik, dan 36 total tanggapan responden berada pada skala cukup, dengan rentang skor 306-377 berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan Komunikasi yang terjalin sudah baik namun masih harus ditingkatkan agar menjadi sangat baik.

Pada tahap pertama penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan, komunikasi merupakan hal utama dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan LPPD, ini disebabkan agar seluruh OPD dapat mengetahui informasi –informasi betapa pentingnya LPPD tersebut. Penyampaian informasi tersebut dapat berjalan dengan baik apabila informasi tersebut dapat diteruskan terhadap seluruh aparatur

yang berada di perangkat daerah agar mengerti betapa pentingnya penyusunan LPPD tersebut.

Informasi yang disampaikan kepada OPD merupakan betapa pentingnya LPPD itu sendiri mulai dari data yang harus dikumpulkan sampai dengan LPPD tersebut harus dikumpulkan. Tujuan penyampaian informasi ini agar didapatnya kesepaham persepsi antar seluruh OPD. Hal ini sesuai dengan tanggapan Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama yang menyatakan bahwa:

“penyampaian informasi merupakan hal pertama yang dilakukan dalam penyusunan LPPD dikarenakan data-data yang berada di LPPD merupakan capaian kinerja seluruh OPD sehingga OPD wajib mengetahui mengenai apa saja yang harus dikumpulkan.”

Selanjutnya hal ini juga sesuai dengan tanggapan Asistena Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pelalawan yang menyatakan bahwa:

“komunikasi merupakan hal utama dalam penyusunan LPPD dikarenakan tanpa adanya komunikasi yang baik antara Tim Penyusunan dan seluruh OPD maka hasil dari LPPD tidak akan maksimal, penyampaian informasi ini sering saya sampaikan dan ingatkan bahkan 3 bulan sebelum penyusunan LPPD ini dimulai sudah saya ingatkan dan sering disampaikan baik secara lisan dalam pertemuan-pertemuan maupun dengan cara mengirimkan surat .”

Sekretaris Daerah yang merupakan Ketua dari Tim Penyusunan LPPD menyampaikan dalam wawancara yang dilakukan penulis bahwa:

“walaupun komunikasi yang kami sampaikan dalam penyampaian informasi sudah sangat sering disampaikan namun masih ada beberapa OPD yang belum mengindahkan informasi yang disampaikan dikarenakan OPD dikarenakan Kepala OPD biasanya tidak mengerti dan ambil pusing dengan data-data yang diminta namun Kepala OPD langsung mendisposisikan kepada bawahannya.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan meskipun tim penyusun LPPD telah melaksanakan komunikasi yang baik dengan cara penyampain informasi-informasi namun masih ada OPD yang masih menganggap bahwa penyusunan LPPD tidaklah penting atau penyampaian informasi yang disampaikan hanya sampai di Kepala OPD tanpa ada tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kepala OPD untuk mencari tahu apakah data tersebut sudah ada ataupun belum, padahal isi dalam LPPD tersebut merupakan raport dari Kepala Daerah yang juga mencerminkan raport dari masing-masing OPD.

Berdasarkan observasi penulis menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin sebenarnya sudah baik dikarenakan penyampaian informasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik namun memang masih ada ditemukan beberapa OPD yang masih bersikap acuh dikarenakan kurangnya alur informasi yang disampaikan dari atasan-atasan OPD terhadap bawahannya. Penyampaian informasi yang disampaikan melalui Bagian Tata Pemerintahan sudah sangat baik dikarenakan disampaikan secara terinci data-data apa yang diperlukan pada masing-masing OPD secara garis besar hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan hasil dari dokumentasi yang didapat penulis:

Tabel 5.7
Jumlah Indikator Kinerja Kunci pada setiap OPD

No	OPD	Lampiran 3.1	Lampiran 3.2	Lampiran 3.3
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	19 IKK	21 IKK	2 IKK
2	Sekretariat Dewan	1 IKK	21 IKK	Tidak Ada
3	Inspektorat Daerah	1 IKK	21 IKK	2 IKK
4	Dinas Pendidikan	Tidak Ada	21 IKK	15 IKK
5	Dinas Kesehatan	Tidak Ada	21 IKK	19 IKK
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak Ada	21 IKK	19 IKK

1	2	3	4	5
7	Dinas Sosial	Tidak Ada	21 IKK	5 IKK
8	Dinas Tenaga Kerja	Tidak Ada	21 IKK	8 IKK
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	Tidak Ada	21 IKK	8 IKK
10	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tidak Ada	21 IKK	4 IKK
11	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Ada	21 IKK	3 IKK
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 IKK	21 IKK	2 IKK
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak Ada	21 IKK	4 IKK
14	Dinas Perhubungan	Tidak Ada	21 IKK	2 IKK
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Ada	21 IKK	8 IKK
16	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Tidak Ada	21 IKK	13 IKK
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 IKK	21 IKK	3 IKK
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tidak Ada	21 IKK	11 IKK
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tidak Ada	21 IKK	5 IKK
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak Ada	21 IKK	2 IKK
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tidak Ada	21 IKK	1 IKK
22	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2 IKK	21 IKK	3 IKK
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14 IKK	21 IKK	9 IKK
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada	21 IKK	2 IKK
25	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tidak Ada	21 IKK	1 IKK
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2 IKK	21 IKK	2 IKK
27	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	3 IKK
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR	1 IKK	21 IKK	5 IKK
29	Kecamatan	Tidak Ada	21 IKK	Tidak Ada

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, 2020

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang penulis peroleh jumlah Indikator Kinerja Kunci yang ada dalam LPPD berjumlah 235 IKK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lampiran 3.1 Tataran Pengambil Kebijakan berjumlah 39 IKK
- b. Lampiran 3.2 Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
- c. Lampiran 3.3 Tataran Pelaksana Kebijakan aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan.

Melihat data-data di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi melalui indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik namun memang harus ada perbaikan untuk kedepannya terlebih bagi OPD yang masih memandang sebelah mata penyusunan LPPD dikarenakan dengan komunikasi yang baik antara seluruh pihak maka akan tercapai penyusunan LPPD yang berkualitas sangat baik dan dapat membantu untuk meningkatkan capaian kinerja Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang juga mencerminkan raport dari Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan juga termasuk raportnya masing-masing OPD kepada Kepala Daerah

5.2.3.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran akan pentingnya koordinasi merupakan salah satu indikator yang tidak dapat dilupakan atau dianggap sebelah mata, dikarenakan kesadaran dari masing-masing OPD untuk dapat meningkatkan capaian kerjanya. Apabila seluruh OPD tidak memiliki kesadaran ataupun tanggung jawab terhadap penyusunan LPPD maka hasilnya akan tidak baik. Rasa ingin jauh lebih baik dalam melaksanakan pekerjaan akan dapat membantu penyusunan LPPD terlebih

lagi informasi yang disampaikan oleh OPD dapat membantu meningkatkan hasil dari penyusunan LPPD tersebut.

Hasil dari data penelitian yang telah peneliti lakukan pada Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam tim penyusun LPPD pada masing-masing OPD yang sebagian besarnya juga memiliki jabatan sebagai kasubbag program dan keuangan, maka didapati tanggapan reseponden atau jawaban kuesioner yang disebarakan terhadap indikator kesadaran pentingnya koordinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.8
Analisis tanggapan responden tentang Indikator Kesadaran pentingnya koordinasi

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Tingkat Pengetahuan terhadap koordinasi penyusunan LPPD	1	21	8	0	0	113
2	Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi penyusunan LPPD	1	4	25	0	0	96
	Total Tanggapan	10	100	99	0	0	209
	Rentang Skor						204 – 251
	Kategori						Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Melalui tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) item pernyataan yang diajukan peneliti kepada 30 responden maka didapat 209 total jawaban tentang Kesadaran pentingnya koordinasi, sebanyak 10 total tanggapan responden berada pada skala sangat baik, 100 total tanggapan responden pada skala baik, dan 99 total tanggapan responden berada pada skala cukup, dengan rentang skor 204-

251 berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan kesadaran pentingnya koordinasi sudah baik namun masih harus ditingkatkan agar menjadi sangat baik.

Melihat hasil tanggapan responden dari tabel 5.8 data dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan terhadap penyusunan LPPD masih dalam kategori baik, namun angka kategori sangat baik sangatlah sedikit dan masih ada kategori cukup. Hal tersebut bisa menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai penyusunan LPPD masih belum dimengerti oleh komponen yang ada di OPD dan menunjukkan masih adanya masalah koordinasi baik dari tim penyusun LPPD Kabupaten kepada OPD ataupun tim penyusun LPPD OPD terhadap komponen yang berada di OPD yang mereka tempati.

Adapun hasil wawancara dengan Kasubag Administrasi Pemerintahan dan OTDA menyatakan bahwa:

“tingkat pengetahuan tim penyusun LPPD OPD sebenarnya sudah baik namun dikarenakan data yang diminta merupakan data yang ada di bidang-bidang maka itulah yang mengakibatkan tingkat pengetahuan penyusun LPPD OPD terhadap data yang diminta sangat kurang dan terkadang penyusun LPPD OPD merasa bingung dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh bidang-bidang menanyakan kembali kepada penyusun LPPD OPD data yang diminta tersebut dasarnya darimana.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kabag Tapem dan Kerjasama menyatakan bahwa:

“tingkat pengetahuan di bidang-bidang OPD sebagian besar masih tidak mengerti mengenai LPPD, hal tersebut mungkin dikarenakan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama kepada seluruh OPD tidaklah sampai dengan seluruh komponen yang ada di OPD melainkan hanya diketahui oleh Kepala OPD, Sekretaris OPD dan Kasubag program ataupun pejabat yang ditugaskan oleh Kepala OPD untuk menyiapkan data-data

LPPD yang berada pada OPD. Kemudian terkadang di OPD terkesan ada yang tidak ingin berusaha untuk mencari data yang dibutuhkan dan langsung membuat surat pernyataan bahwa data tersebut memang tidak ada di OPD tersebut, padahal setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata data dibutuhkan memang ada pada OPD tersebut.”

Adapun hasil wawancara Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan menyatakan bahwa:

“memang ada beberapa data capaian kinerja yang diminta ternyata tidak dimiliki oleh OPD terkait namun data tersebut terdapat di OPD lainnya contohnya adalah jumlah penduduk dan izin-izin yang dikeluarkan di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, yang sebenarnya data indikator kinerja kunci tersebut berada pada urusan OPD terkait namun dalam pelaksanaan dilapangan harus adanya koordinasi antar berbagai OPD. Disinilah fungsi kami sebagai koordinator dalam penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan yaitu menjembatani antar OPD untuk mendapatkan data-data capaian kinerja atau indikator kinerja kunci yang lebih valid dan dapat meningkatkan hasil dari penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan..”

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Tim Daerah EKPPD

Bapak M. Hijrah menyatakan bahwa:

“data capaian kinerja dan indikator kinerja kunci yang terdapat di LPPD merupakan hasil dari kumpulan permintaah seluruh Kementerian terkait dengan urusan pemerintahan yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri selanjutnya dijadikan dasar dalam pembuatan lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam LPPD sehingga dapat dinyatakan bahwa LPPD merupakan Laporan yang kompleks dikarenakan data yang ada merupakan data yang dibutuhkan oleh seluruh kementerian. Jadi malah akan menjadi pertanyaan mengapa OPD tidak dapat menyajikan data dikarenakan permintaan data tersebut berasal dari kementerian teknis terkait urusan pemerintahan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai kesadaran pentingnya koordinasi harus ditingkatkan kembali dikarenakan masih terdapat aparatur di OPD yang masih bingung dengan

data yang diminta sehingga menggunakan cara cepat dalam pengisian capaian kinerja tersebut dengan cara membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa data tersebut tidak dimiliki oleh OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan kepada Kasubag Program Dinas Pendidikan Bapak Maslan menyatakan bahwa:

“masing-masing bidang seharusnya langsung dapat menyerahkan data capaian kinerja pada awal tahun namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan padahal data-data yang diminta merupakan data yang selalu diminta oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama setiap tahun. Sehingga pengumpulan datanya agak terhambat dikarenakan tidak sadarnya bidang-bidang mengenai data capaian kinerja yang merupakan data LPPD yang selalu diminta. Itu menunjukkan bahwa bidang harus diingatkan terlebih dahulu baru mereka mau bergerak untuk mengumpulkan data tersebut.”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dilanjutkan dengan observasi yang penulis lakukan penulis menemukan memang terdapat indikator kinerja kunci yang harus diisi oleh lintas OPD dikarenakan data yang dibutuhkan tidak dapat hanya disajikan oleh salah satu OPD aja karena tidak sesuai dengan urusan yang dilaksanakan OPD tersebut sehingga membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan OPD lainnya. Untuk menjembatani hal tersebut tim penyusun LPPD Kabupaten Pelalawan melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama telah membuat list terpisah dan menandai indikator kinerja kunci yang membutuhkan data lintas OPD salah satu contoh yang penulis dapat dari hasil dokumentasi adalah pada urusan pendidikan tentang tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD yang seharusnya menjadi

wewenang Dinas Pendidikan namun juga harus dikombinasikan dengan data penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengenai ketaatan terhadap hasil koordinasi berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan skala cukup, hal ini haruslah ditingkatkan kembali dikarenakan data tersebut dapat dinyatakan bahwa OPD masih belum maksimal dalam menaati hasil suatu koordinasi dalam hal ini yaitu penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan kemungkinan besar adalah terlambatnya penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan.

Adapun hasil wawancara dengan Kasubag Administrasi Pemerintahan dan OTDA menyatakan bahwa:

“Saat mendengar keluhan kesah dari penyusun LPPD OPD mereka menyampaikan bahwa pada awal tahun ini memang banyak laporan yang harus disusun sehingga membuat ketaatan terhadap pengumpulan LPPD terhambat. Dalam hal ini saya memberikan informasi kepada mereka bahwa LPPD ini merupakan laporan utama yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah dikarenakan dikumpulkan langsung ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga dimohon jangan menomorduakan atau tidak dijadikan sebagai prioritas.”

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyatakan bahwa:

“Pada awal tahun ini memangn banyak laporan yang harus dibuat oleh OPD seperti LKPJ, laporan keuangan, laporan aset, laporan kinerja dan laporan-laporan lainnya yang memang pelaksanaan pembuatannya diwaktu yang sama. Selanjutnya permasalahan yang terjadi adalah rata-rata laporan-laporan yang dibuat dibebankan semua kepada 1 orang yaitu kasubbag program dan keuangan, hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab. Oleh karena itu saya menugaskan staf Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama agar dapat jemput bola ke masing-masing OPD, namun menurut laporan yang diterima dari Bagian Tapem dan Kerjasama hasil yang didapat tidak terlalu maksimal.”

Kemudian hasil wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama, menyatakan bahwa:

“kami telah melakukan segala cara dalam pengumpulan data ke seluruh OPD baik itu melalui asistensi di ruang Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama ataupun dengan cara jemput bola yaitu langsung mendatangi setiap OPD, namun hasil yang didapat juga tidak maksimal dikarenakan ada OPD yang pada saat kami datangi tidak ada ditempat padahal sudah kami berikan jadwal kapan kami akan turun untuk langsung datang ke masing-masing OPD. Selanjutnya kami juga menggunakan teknologi informasi yaitu melalui grup WA dan selalu mengingatkan seluruh OPD dalam grup tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan terhadap koordinasi dalam penelitian ini berkaitan dengan penyusunan LPPD sebenarnya sudah cukup baik namun kendala dengan begitu banyaknya laporan yang harus dikerjakan pada awal tahun yang membuat penyusunan LPPD juga agak terhambat hal ini juga dapat disebabkan oleh tingkat pengetahuan pada aparatur masing-masing OPD yang tidak langsung menyiapkan data yang dibutuhkan melainkan harus diminta terlebih dahulu, apabila data yang dibutuhkan cepat dikumpulkan oleh bidang-bidang pada masing-masing OPD maka tugas dari pengumpul data tersebut lebih muda.

Berdasarkan hasil observasi penulis menyatakan bahwa pengumpulan data-data yang diminta dalam LPPD sebagian besar terkumpul pada minggu ketiga bulan februari namun data terkumpul tersebut masih berbentuk angkanya saja belum dilampirkan dengan data pendukungnya, hal tersebut mengakibatkan penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan agak terhambat penyusunan. Oleh sebab itu, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama telah melaksanakan berbagai cara

dalam pengumpulan data-data LPPD, seperti selalu diingatkan melalui *coffee morning* yang diadakan pada setiap hari senin, dengan cara jemput bola, selanjutnya dengan cara melaksanakan asistensi dengan memanggil seluruh OPD untuk didampingi dan membantu untuk menjelaskan data-data yang dibutuhkan,

5.2.3.3 Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan ini menunjukkan keterlibatan dari pejabat-pejabat yang berada di Kabupaten Pelalawan dalam penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan. Keterlibatan tersebut adalah seperti dengan memberikan kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung dalam membantu penyusunan LPPD. Selain keterlibatan pejabat-pejabat yang ada di OPD aparatur-aparatur pegawai pada OPD juga dapat memberikan kontribusi selagi masih dalam kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut.

Hasil dari data penelitian yang telah peneliti lakukan pada Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam tim penyusun LPPD pada masing-masing OPD yang sebagian besarnya juga memiliki jabatan sebagai kasubbag program dan keuangan, maka didapati tanggapan reseponden atau jawaban kuesioner yang disebarkan terhadap indikator kompetensi partisipan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.9
Analisis tanggapan responden tentang Indikator Kompetensi Partisipan

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Keterlibatan pejabat berwenang	0	19	11	0	0	109
2	Keterlibatan aparatur terkait yang terlibat	0	23	7	0	0	113
	Total Tanggapan	0	168	54	0	0	222
	Rentang Skor						204 – 251
	Kategori						Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Melalui tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) item pernyataan yang diajukan peneliti kepada 30 responden maka didapat 222 total jawaban tentang Kompetensi Partisipan, sebanyak 168 total tanggapan responden pada skala baik, dan 99 total tanggapan responden berada pada skala cukup, dengan rentang skor 204-251 berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan Kompetensi Partisipan sudah baik namun masih harus ditingkatkan agar menjadi sangat baik.

Berdasarkan tabel 5.8, hasil kuesioner menunjukkan bahwa kompetensi partisipan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat berada pada skala cukup hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pada beberapa OPD yang pejabat-pejabat masih belum memberikan kontribusi yang baik selain itu menunjukkan adanya informasi yang tersampaikan masih kurang atau memang pejabat yang terlibat tidak terlalu mengerti tentang data yang diminta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah, menyatakan bahwa:

“Sebenarnya seluruh pejabat yang ada di OPD seharusnya memiliki data-data yang dibutuhkan kecuali data tersebut memang tidak ada kegiatannya seperti urusan transmigrasi yang tidak dilaksanakan. Namun data yang memang ada haruslah dilengkapi, meskipun saya ada mendengar alasan yaitu dikarenakan terjadinya mutasi maka data itu tidak ada atau dibawa oleh pejabat sebelumnya. Alasan seperti itu tidaklah dapat diterima dikarenakan seperti tidak ada usaha dari pejabat tersebut untuk mencari terlebih dahulu data tersebut. Kemudian pelaksanaan mutasi dilaksanakan bukan karena ada unsur aneh-aneh ataupun tidak suka melainkan dilaksanakan berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang ada serta hasil kinerja dari seluruh pegawai negeri sipil yang berada di Kabupaten Pelalawan apakah pejabat yang sedang menduduki jabatan yang ada melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat.”

Hal ini senada sesuai wawancara dengan Kasubag Administrasi Pemerintahan dan OTDA, menyatakan bahwa:

“Alasan mengenai terjadinya mutasi mengakibatkan data yang dibutuhkan tidak ada atau dibawa oleh pejabat sebelumnya sudah sering kami dengar namun bagi kami itu tidak bisa dijadikan alasan dikarenakan itu merupakan urusan dapur dari masing-masing OPD. Kami tetap berpedoman bahwa apabila data tersebut ada pada tahun sebelumnya ataupun laporan sebelumnya maka untuk tahun yang akan datang seharusnya data tersebut tetap ada. Kemudian kami memberikan apresiasi kepada pejabat baru yang dapat memberikan data yang diminta dengan lengkap.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyatakan bahwa:

“Saya selalu mengingatkan kepada seluruh pejabat-pejabat pada OPD untuk mengumpulkan data-data terkait LPPD dengan cara per triwulan sehingga pada akhir tahun tugas untuk mengumpulkan data tersebut tidak terlalu sulit, namun dalam pelaksanaannya hanya beberapa OPD yang melakukannya. Padahal cara tersebut dapat menanggulangi permasalahan yang timbul dikarenakan terjadinya mutasi.”

Permasalahan-permasalahan yang terjadi terkadang dikarenakan kurangnya pengetahuan pejabat-pejabat mengenai tupoksi utamanya sehingga membuat pejabat tersebut langsung menyatakan bahwa data tersebut tidak ada dan juga ditemukan adanya perbedaan persepsi antara data yang diminta dengan data yang ada atau tidak pada OPD. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan terhadap kasubag program Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Bapak Mail yang menyatakan bahwa:

“terdapat data-data yang tidak dipenuhi dikarenakan pada Bidang menyatakan bahwa data tidak ada meskipun sebenarnya data tersebut merupakan tupoksi dari Bidang tersebut. Sehingga terkadang kami sebagai pengumpul data pada OPD tidak tahu untuk mencari data tersebut kemana yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari bidang tersebut untuk mencari datanya ataupun kalau memang tidak ada dapat memberikan alasan yang jelas mengapa data tersebut tidak ada.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilaksanakan kepada kasubag program Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“terdapat data yang harus saya olah dulu dikarenakan tidak sesuai dengan yang diminta oleh Bagian Tapem dan Kerjasama, hal itu dikarenakan pada bidang terkait menggunakan data BPS dalam melengkapi data yang diminta, sedangkan permintaan dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama tidak akan menerima data yang berasal dari BPS kecuali data PDRB.”

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti ditemukan bahwa fakta dilapangan memang ada beberapa OPD yang menyatakan bahwa akibat terjadinya mutasi ini membuat keterlambatan bagi OPD untuk dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan apalagi jika terjadi mutasi di setiap bidang pada OPD ataupun pejabat yang baru ditugaskan untuk menyiapkan data

penyusunan LPPD ini. Kemudian terkadang ada penyusun LPPD OPD yang merasa selalu disalahkan dikarenakan terlambatnya penyampaian data padahal data yang dibutuhkan didapat dari data-data bidang sehingga keterlibatan pada seluruh komponen yang berada pada OPD sangat berpengaruh.

Kemudian berdasarkan hasil dokumentasi memang jelas dinyatakan bahwa data-data capaian kinerja yang diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama merupakan data yang tidak berasal dari data Badan Pusat Statistik melainkan data yang memang dikeluarkan oleh OPD terkait terkecuali data PDRB, dikarenakan dalam LPPD ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap capaian kinerja dari masing-masing OPD. Apabila OPD menggunakan data dari BPS itu menunjukkan bahwa OPD tersebut tidak memiliki data sendiri yang semesetinya harus dikeluarkan oleh OPD itu sendiri.

Selanjutnya dengan seringnya informasi yang disampaikan oleh tim penyusun LPPD Kabupaten Pelalawan dalam berbagai kesempatan terlebih pada saat pelaksanaan *coffee morning* yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan dihadiri oleh seluruh pejabat-pejabat yang ada pada OPD. Pada kesempatan *coffee morning* tersebut disampaikan progres mengenai masing-masing OPD dan kendala yang sedang dihadapi pada masing-masing OPD, namun dalam mengumpulkan data terkait LPPD ini kontribusi dari pejabat-pejabat terkait hanya menugaskan stafnya yang terkadang staf tersebut tidak juga mengerti dengan data yang diminta.

5.2.3.4 Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi disini menunjukkan pada masing-masing OPD untu dapat berkontribusi dengan hasil yang sudah disepekat dan menggunakan seluruh upaya untuk dapat melaksanakan kesepakatan tersebut dengan tanggung jawab. Apabila hal ini dilaksanakan maka penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan akan mendapatkan nilai yang jauh lebih baik lagi dikarenakan LPPD ini merupakan dasar bagi penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh tim daerah dalam hal ini terdiri dari Biro Pemerintahan Provinsi, Inspektorat Daerah Provinsi, BPKP perwakilan Riau dan tim nasional yaitu Kementerian Dalam Negeri.

Hasil dari data penelitian yang telah peneliti lakukan pada Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam tim penyusun LPPD pada masing-masing OPD yang sebagian besarnya juga memiliki jabatan sebagai kasubbag program dan keuangan, maka didapati tanggapan reseponden atau jawaban kuesioner yang disebarkan terhadap indikator kesepakatan, komitmen dan Insentif Koordinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.10
Analisis tanggapan responden tentang Indikator Kesepakatan, Komitmen
dan Insentif Koordinasi

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Kesepakatan OPD dalam penyusunan LPPD	0	25	5	0	0	115
2	Pelaksana kegiatan di OPD dalam penyusunan LPPD	0	6	24	0	0	96
3	Berjalannya sanksi bagi pelanggar kesepakatan	0	4	26	0	0	94
	Total Tanggapan	0	140	165	0	0	305
	Rentang Skor						234 – 305
	Kategori						Cukup

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Melalui tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pernyataan yang diajukan peneliti kepada 30 responden maka didapat 305 total jawaban tentang Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi, sebanyak 140 total tanggapan responden pada skala baik, dan 165 total tanggapan responden berada pada skala cukup, dengan rentang skor 234-305 berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi harus ditingkatkan dikarenakan masih jauh dari sangat baik dan akan berpengaruh terhadap penyusunan LPPD.

Berdasarkan tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa hasil kuesioner tersebut indikator kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi masih dalam skala cukup, padahal indikator ini merupakan salah satu penunjang dalam

pelaksanaan koordinasi penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan. Hal tersebut dikarenakan kesepakatan yang sudah dibuat harus selalu diingatkan oleh tim penyusun LPPD Kabupaten Pelalawan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka pelaksanaan dari kesepakatan tersebut sering dilupakan dikarenakan begitu banyaknya laporan yang dibuat oleh penyusun LPPD OPD.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama, menyatakan bahwa:

“Dalam hal kesepakatan masing-masing OPD sudah baik namun permasalahannya ada pada komitmen saat kesepakatan itu dilaksanakan, OPD sering lupa atau merasa data yang dibutuhkan merupakan tanggung jawab dari tim penyusun LPPD Kabupaten Pelalawan sehingga menunggu untuk dijemput ataupun menunda-nunda pengiriman data-data tersebut.”

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama, menyatakan bahwa:

“Komitmen masing-masing OPD sangatlah kurang, sehingga saya selalu menanyakan kepada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama untuk menyampaikan OPD mana saja yang belum mengumpulkan data, sehingga saya dapat langsung menyampaikan di grup wa Kepala OPD untuk segera mengumpulkan data tersebut. Terkadang saya juga langsung menelepon pegawai teknis pada masing-masing OPD agar segera mengumpulkan data yang dibutuhkan.”

Kemudian hasil wawancara dengan Kasubag Administrasi Pemerintahan dan OTDA, menyatakan bahwa:

“Bagian Pemerintahan telah melaksanakan berbagai cara dalam meningkatkan penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat bersama OPD, jemput bola dalam pengumpulan data, melaksanakan Asistensi terhadap seluruh OPD, melaksanakan workshop penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan dengan menghadirkan narasumber dari pusat. Namun masih saja ada

beberapa OPD yang belum melengkapi data yang dimaksud, hal ini disebabkan belum adanya sanksi yang terlalu tegas terhadap OPD yang belum mengumpulkan dikarenakan akan menjadi dilema sendiri terhadap tim penyusun LPPD Kabupaten apabila data tersebut dibiarkan kosong maka akan berpengaruh kepada hasil EKPPD Kabupaten .”

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam indikator ini adalah dikarenakan kurangnya komitmen yang ada pada OPD dikarenakan hasil kesepakatan yang terjadi hanya sampai pada Kepala OPD yang kemudian diteruskan kepada kasubag program OPD yang merupakan penyusun LPPD OPD, dan kesepakatan tersebut tidak tersampaikan pada bidang-bidang yang merupakan pelaksana teknis di masing-masing OPD. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kasubag program Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Bapak Mail yang menyatakan bahwa, menyatakan bahwa:

“pada masing-masing bidang terkadang tidak mengetahui tentang kesepakatan yang dibuat sehingga kami terkadang harus menjelaskan kembali mengenai data capaian kinerja yang diminta dan meskipun informasi tersebut sudah disampaikan pengumpulan data masih menunggu dikarenakan alasan yang diberikan oleh bidang adalah data belum diolah ataupun data tersebut harus dicari terlebih dahulu dan diolah kembali .”

Kemudian hasil wawancara dengan Kasubag proram Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bapak Reki, menyatakan bahwa:

“Meskipun kami sudah jelaskan kemasing-masing bidang dan menginformasikan rentan waktu pengumpulan data tersebut, namun dalam kenyataannya pengumpulan data dari masing-masing bidang masih menunggu waktu dan proses yang cukup lama .”

Berdasarkan hasil observasi penulis menyatakan bahwa Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama telah melakukan segala cara untuk selalu

mendampingi OPD dalam penyusunan LPPD dan meningkatkan kontribusi masing-masing OPD dengan berbagai kegiatan, kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Rapat bersama OPD

Tujuan dilaksanakan rapat ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pengumpulan data serta mengumpulkan informasi awal dari OPD serta menyampaikan rangkaian jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten.

2. Kegiatan Jemput Bola data-data LPPD

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu OPD agar dapat mengumpulkan data-data LPPD, sehingga penyusun LPPD OPD dapat menunggu tim untuk menjemput data-data apa saja yang dikumpulkan dan ini dapat meringankan penyusun pada OPD dikarenakan begitu banyaknya Laporan yang harus dibuat pada awal tahun.

3. Asistensi Penyusunan LPPD terhadap OPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu OPD dalam mengisi Indikator Kinerja Kunci mengenai data-data seperti apa yang dibutuhkan oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten agar terjadi satu persepsi antara tim penyusun LPPD Kabupaten dengan seluruh OPD.

4. Workshop penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan

Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab seluruh pertanyaan dari OPD yang sudah dikumpulkan serta berdiskusi bersama seluruh OPD untuk meningkatkan hasil dari penyusunan LPPD Kabupaten, dengan mendatangkan narasumber yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Biro Pemerintahan Provinsi.

5.2.5 Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan ini merupakan indikator terakhir dalam koordinasi yang diambil oleh penulis, pentingnya indikator ini adalah adanya perencanaan perubahan ke arah yang lebih baik, dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya adalah bagaimana meningkatkan data-data dari OPD dari tahun ke tahun sehingga data yang disampaikan tidak selalu sama. Hal tersebut dilaksanakan agar hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim EKPPD terhadap LPPD selalu meningkat setiap tahunnya yang sekarang statusnya T (Tinggi) akan menjadi ST (Sangat Tinggi) seperti yang pernah diraih Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015.

Hasil dari data penelitian yang telah peneliti lakukan pada Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam tim penyusun LPPD pada masing-masing OPD yang sebagian besarnya juga memiliki jabatan sebagai kasubbag program dan keuangan, maka didapati tanggapan reseponden atau jawaban kuesioner yang disebarkan terhadap indikator kontinuitas perencanaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.11
Analisis tanggapan responden tentang Indikator Kontinuitas perencanaan

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Umpan balik OPD dalam peningkatan penyusunan LPPD	0	4	26	0	0	115
2	Perubahan yang dilakukan terhadap penyusunan LPPD	0	4	26	0	0	96
	Total Tanggapan	0	32	156	0	0	188
	Rentang Skor						156 – 203
	Kategori						Cukup

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Melalui tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) item pernyataan yang diajukan peneliti kepada 30 responden maka didapat 188 total jawaban tentang Kontinuitas perencanaan, sebanyak 32 total tanggapan responden pada skala baik, dan 156 total tanggapan responden berada pada skala cukup, dengan rentang skor 156-203 berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan Kontinuitas perencanaan harus ditingkatkan kembali agar menjadi baik dan sangat baik dikarenakan akan berpengaruh terhadap kualitas penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, menyatakan bahwa:

“Tingkat kontribusi dari masing-masing OPD untuk meningkatkan kembali capaian kinerjanya masih kurang dikarenakan terdapat beberapa OPD yang memberikan data sama persis dengan data yang

diberikan pada tahun lalu ataupun capaian kinerjanya ada yang meningkat namun ada juga yang menurun. Kemudian dalam hal capaian kinerja yang meningkat tidaklah terlalu signifikan”

Kemudian hasil dari wawancara dengan Tim EKPPD Bapak M.Hijrah, menyatakan bahwa:

“Hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap LPPD Kabupaten Pelalawan sebenarnya masih mengalami naik turun dari tahun ke tahun, ini disebabkan Kabupaten Pelalawan yang seharusnya pada saat ini fokus kepada peningkatan capaian kinerja dari indikator kinerja kunci namun sekarang masih berfokus pada kelengkapan data agar isian pada saat evaluasi tidak tdi (tidak teridentifikasi) atau data tidak ada. Padahal Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015 sudah pernah mendapatkan nilai ST, ini menunjukkan adanya capaian kinerja yang turun namun sekarang sudah merangkak naik tapi masih tidak konsisten. Hasil dari evaluasi yang dilaksanakan juga masih ditemukan data pendukung yang belum valid dikarenakan data tersebut dikeluarkan sudah lama, yang mengakibatkan data yang disampaikan dari tahun ke tahun tetap sama tidak mengalami peningkatan capaian kinerja.”

Adapun hasil dari wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kerjasama, menyatakan bahwa:

“Terkadang pejabat yang baru dilaksanakan mutasi menyampaikan data sama dengan data sebelumnya. Kemudian pejabat tersebut tidak memprioritaskan data terkait LPPD tersebut dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sehingga timbul pemikiran bahwa data tersebut memang tidak ada dan tidak diupdate adapun yang beranggapan bahwa kegiatan itu memang tidak dilaksanakan. Kondisi inilah yang membuat terkadang capaian kinerja yang disampaikan OPD tidak meningkat. Kemudian dalam pembahasan pada saat rencana kegiatan di Bappeda, OPD terkait tidak memiliki informasi yang cukup mengenai data LPPD sehingga yang sebenarnya kegiatan OPD ada kaitannya dengan data LPPD malah dihapus atau tidak dilaksanakan.”

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilaksanakan kepada kassubag program dan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bapak Reki, menyatakan bahwa:

“sebenarnya kami juga berusaha agar capaian kinerja kami meningkat namun dalam pelaksanaan dilapangan terdapat masalah-masalah yang kami hadapi yaitu yang utama adalah terkendala pada anggaran seperti kegiatan perbaikan jalan yang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, kemudian terdapat kegiatan pengadaan sumber air bersih yang dirasionalisasi atau kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga kami memberikan data yang sama seperti tahun sebelumnya .”

Kemudian hasil wawancara tersebut senada dengan wawancara yang dilaksanakan kepada kasubag program dan keuangan Dinas Pendidikan Bapak Mazlan, menyatakan bahwa:

“kami telah berusaha untuk meningkatkan capaian kinerja yang ada, namun memang ada beberapa capaian kinerja yang tidak dapat kami penuhi yaitu mengenai angka melek huruf, hal ini disebabkan di dinas kami memang belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk angka partisipasi anak dalam PAUD, kenyataan dilapangan memang masih rendah sehingga kami akan melakukan cara-cara untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar anak-anaknya dapat dimasukkan dalam PAUD .”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis temukan menyatakan bahwa setiap OPD dalam peningkatan capaian kinerja seperti terlalu pasrah dengan data yang diberikan dikarenakan tidak ada usaha untuk mencari lebih jauh mengenai data yang diminta. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil capaian kinerja yang di peroleh Kabupaten Pelalawan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.12
Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Pelalawan

Nama Pemda	2018*		2017		2016		2015	
	Skor	Prestasi	Skor	Prestasi	Skor	Prestasi	Skor	Prestasi
Kab. Pelalawan	2,946	T	2,8552	T	2,8746	T	3,0084	ST

Ket: untuk Tahun 2018 masih hasil evaluasi se-Provinsi Riau

Sumber : diolah dari hasil evaluasi LPPD Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kabupaten Pelalawan masih turun naik sehingga membuktikan bahwa capaian kinerja yang disampaikan oleh OPD sangat berpengaruh dengan hasil capaian kinerja Kabupaten Pelalawan. Perencanaan yang berkelanjutan dibuat di OPD mempunyai peran penting dikarenakan dari sini akan menunjukkan progres dari setiap OPD demi meningkatkan capaian kinerja yang akan dicapai selanjutnya juga dapat merumuskan masalah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi menyatakan bahwa terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci yang memiliki nilai yang harus diperhatikan dan perlu dicermati oleh setiap OPD yaitu sebagai berikut:

1. Lampiran 3.1 Tataran Pengambilan kebijakan memiliki nilai 30 persen dari seluruh nilai LPPD dengan 39 IKK. Adapun indikator yang berpengaruh atau memiliki nilai yang cukup tinggi antara lain adalah penghargaan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Waktu penetapan Perda APBD, Belanja untuk Pelayanan Dasar (6 urusan wajib), Keberadaan Perda tentang Pelayanan Publik, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Daerah (2 tahun berturut-turut) dan Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti.

2. Lampiran 3.2 Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum memiliki nilai 15 persen dari seluruh nilai LPPD dengan 21 IKK. Adapun indikator yang berpengaruh atau memiliki nilai yang cukup tinggi adalah Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat, Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan, serta keberadaan Standar Operating Prosedur (SOP) teknis.
3. Lampiran 3.3 Tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dengan nilai 50 persen dari seluruh nilai LPPD dengan 175 IKK. Adapun indikator yang berpengaruh memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu urusan pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Trantibum dan Linmas serta urusan sosial capaian kinerja harus diatas 90 persen – 100 persen (kecuali yang negatif).
4. Dokumen LPPD memiliki nilai sebesar 5 persen dari seluruh nilai LPPD.

Berdasarkan data diatas sebenarnya bisa menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam kontinuitas perencanaan untuk meningkatkan capaian kinerja masing-masing OPD dikarenakan setiap OPD memiliki kontribusi untuk dapat menaikkan kinerja dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Kemudian jika dilihat dari buku LPPD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Pelalawan dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang ada pada OPD memang terdapat peningkatan namun tidak terlalu signifikan, contohnya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang capain kinerja berdasarkan indikator kinerja kunci yang terdapat pada LPPD Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13
Capaian Kinerja Dinas PUPR berdasarkan LPPD Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018

No	IKK	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
1	% panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	39,21%	39,37%
2	% Luas Irigasi kabupaten Baik	23,00%	23,56%
3	% Rumah Tangga Per Sanitasi	88,80%	91,81%
4	% Kawasan Kumuh	0,005%	0,001%
5	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,01%	0,01%
6	% rumah tangga yang menggunakan air bersih	3,55%	3,61%
7	% Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh	0,004%	0,001%

8	Rasio rumah layak huni	61,26%	62,60%
---	------------------------	--------	--------

Sumber: LPPD Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memang mengalami kenaikan persentasi namun tidak terlalu signifikan, dan terdapat angka yang sama. Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik apabila melihat tabel 5.13 menunjukkan kenaikan hanya 0,16 persen ini membuktikan bahwa panjang jalan kabupaten Pelalawan masih banyak dalam kondisi yang kurang baik maupun tidak baik. Selanjutnya mengenai data irigasi juga hampir sama peningkatannya dengan jalan yang peningkatannya masih tidak terlalu berpengaruh sehingga menunjukkan luas irigasi kabupaten Pelalawan masih jauh dari kata baik dikarenakan berada diangka tetap yaitu 23 persen. Melalui kontinuitas perencanaan yang baik maka capaian kinerja mengenai panjang jalan dan luas irigasi Kabupaten dapat ditingkatkan lagi dikarenakan berada diangka dibawah 50 persen dan masih jauh dari baik yang sebenarnya akan berpengaruh pada pelayanan yang akan diberikan Pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai rasio ruang terbuka hijau ditemukan bahwa capaian kerjanya masih jauh dari amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW yang mengharuskan Kabupaten menyiapkan ruang terbuka hijau sebesar 20 persen dari total rencana tata rauang daerah. Berdasarkan data lampiran yang diberikan Dinas PUPR hanya sebatas taman-taman milik Pemda di Ibukota

Kabupaten saja sehingga capaian kinerjanya rendah padahal data ruang terbuka hijau dapat diambil antara lain adalah taman-taman milik Pemda, Hutan Kota, Daerah Aliran Sungai (DAS), Tempat Pemakaman Umum (TPU) termasuk hutan lindung. Apabila data-data tersebut dapat dikumpulkan maka target 20 persen yang ditetapkan menurut undang-undang dan peraturan pemerintah dapat di penuhi. Mengenai permasalahan sebenarnya Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama telah melaksanakan koordinasi dengan cara memberikan informasi mengenai data yang diminta namun hasilnya masih sama dikarenakan alasan dimasing-masing bidang menyatakan data yang dapat dikumpulkan hanya terbatas di ibu kota kabupaten sedangkan untuk di kecamatan-kecamatan terkendala dengan anggaran yang ada pada Dinas PUPR untuk mendata seluruh Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya mengenai capaian kinerja mengenai data rumah tangga pengguna air bersih masih berada diangka yang sangat kecil, ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pelalawan masih susah untuk mendapatkan akses air bersih. Berdasarkan data sekunder yang peneliti dapatkan melalui lampiran yang diserahkan Dinas PUPR menunjukkan bahwa data pengguna air bersih ini belumlah mencakup keseluruhan di Kabupaten Pelalawan, melainkan data yang ada merupakan data yang hanya dibangun oleh Dinas PUPR saja sehingga capaian kinerja terlihat sedikit. Berdasarkan hasil observasi peneliti menyatakan bahwa sebenarnya data rumah tangga pengguna air bersih dapat jauh lebih tinggi apabila didata kembali perkecamatan namun kembali terkendala pada anggaran kegiatan

yang memang masih berfokus pada pembangunan sedangkan untuk pendataan secara menyeluruh memang belum pernah dilaksanakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LPPD Tahun Anggaran 2018 realisasi anggaran di Dinas PUPR memang tidak terserap 100 persen, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Anggaran Dinas PUPR Tahun Anggaran 2018

No	Program	Belanja		Sisa Anggaran	Persentasi Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.328.008.000	Rp 3.871.860.768	Rp 456.147.232	11%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 2.401.950.000	Rp 360.515.754	Rp 2.041.434.246	85%
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur	Rp 19.400.000	Rp 14.274.000	Rp 5.126.000	26%
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 21.420.000	Rp 20.746.000	Rp 674.000	3%
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pekerjaan Umum	Rp 7.710.564.000	Rp 2.851.825.885	Rp 4.858.738.115	63%
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 46.239.108.000	Rp 40.997.937.264	Rp 5.241.170.736	11%
7	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 19.687.958.000	Rp 16.334.817.593	Rp 3.353.140.407	17%
8	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 3.914.526.000	Rp 3.671.194.357	Rp 243.331.643	6%
9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	Rp 11.387.763.200	Rp 10.588.668.075	Rp 799.095.125	7%
10	Bina Teknik Bidang ke PU-an	Rp 286.185.000	Rp 77.040.000	Rp 209.145.000	73%

11	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan	Rp 11.149.833.300	Rp 5.186.229.663	Rp 5.963.603.637	53%
12	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Rp 41.539.400	Rp 41.539.400	Rp -	0%
13	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Rp 4.385.355.950	Rp 2.459.387.041	Rp 1.925.968.909	44%
14	Pengendalian Banjir	Rp 7.008.205.000	Rp 2.610.066.745	Rp 4.398.138.255	63%
15	Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Rp 1.355.450.000	Rp 1.171.983.063	Rp 183.466.938	14%
16	RTH Pertamanan	Rp 3.522.998.900	Rp 2.863.392.084	Rp 659.606.816	19%
17	Penataan Kawasan Kumuh	Rp 11.274.777.900	Rp 9.790.709.042	Rp 1.484.068.858	13%
	Jumlah	Rp 134.735.042.650	Rp 102.912.186.734	Rp 31.822.855.917	24%

Sumber: LPPD Tahun Anggaran 2018

Apabila dilihat pada tabel 5.14 realisasi anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang tidaklah sampai 100 persen melainkan masih ada tersisa 24 persen. Berdasarkan buku LPPD tahun anggaran 2018 permasalahan yang terjadi adalah terdapat beberapa paket pekerjaan dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan hal ini disebabkan oleh kelalaian rekanan atau biasa disebut pemegang proyek. Melihat kondisi yang berkaitan dengan program yang berhubungan dengan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten memang sepertinya terkendala dengan pemutusan kontrak yang terjadi sehingga kegiatan dalam pembangunan dan perbaikan jalan tidak dapat direalisasikan hingga 100 persen. Selanjutnya melihat dari anggaran yang diberikan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebenarnya masih membutuhkan anggaran yang cukup besar dikarenakan dengan data realisasi anggaran pada tabel 5.14 hanya dapat meningkatkan persentasi jalan kabupaten kondisi baik tidaklah terlalu tinggi bahkan tidak sampai 1 persen. Melihat hal tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kontinuitas

perencanaan agar dapat membantu capaian kinerja Dinas yang jauh lebih baik lagi dengan bantuan dari segala aspek dan OPD terkait masalah anggaran untuk dijadikan salah satu prioritas sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat meningkat. Hal ini juga berlaku bagi luas irigasi dalam kondisi baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga harus lebih baik merencanakan tentang apa saja yang harus menjadi prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pelalawan.

Mengenai capaian kinerja ruang terbuka hijau dan rumah tangga air bersih seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus dapat merencanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data diseluruh Kecamatan secara terkoordinir, hal ini agar dapat membantu meningkatkan capaian kinerja dinas itu sendiri. Dikarenakan data capaian kinerja ini bukan hanya berpengaruh kepada Dinas terkait melainkan hasil penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bupati Pelalawan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga harus dapat melaksanakan perencanaan apabila anggaran yang penyerapannya agak kurang atau terdapat kendala agar direncanakan untuk anggaran tersebut dapat digeserkan ke kegiatan lainnya pada saat pembahasan APBD perubahan agar dapat membantu capaian kinerja dari kegiatan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang harus dapat memprioritaskan kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan pada tahun berjalan agar tidak menimbulkan SILPA yang cukup tinggi, dikarenakan apabila SILPA dalam kategori tinggi maka Dana yang diberikan dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi.

Berdasarkan buku dan lampiran data pendukung LPPD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018, peneliti dapat melihat bahwa permasalahan yang terjadi pada dinas-dinas lainnya juga hampir sama dengan yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga kontinuitas perencanaan haruslah matang agar dapat membantu dan meningkatkan capaian kinerja OPD dan untuk mengurangi SILPA yang tinggi dikarenakan perencanaan yang kurang matang.

Tabel 5.15

Rekapitulasi tanggapan responden tentang Koordinasi Penyusunan LPPD

No	Indikator	Skala Pengukuran					Skor
		SB	B	C	KB	SKB	
1	Komunikasi	8	70	12	0	0	356
2	Kesadaran pentingnya Koordinasi	2	25	33	0	0	209
3	Kompetensi Partisipan	0	42	18	0	0	222
4	Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi	0	35	55	0	0	305
5	Kontinuitas Perencanaan	0	8	52	0	0	188
	Total Tanggapan	50	720	510	0	0	1280
	Rentang Skor						1224 – 1511
	Kategori						Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 5.11 yang penulis paparkan tentang koordinasi penyusunan LPPD dapat diketahui dari 5 (lima) indikator yang telah peneliti

kemukakan dengan 12 item pertanyaan yang penulis ajukan kepada 30 responden maka didapat total 1280 total jawaban tentang koordinasi penyusunan LPPD, sebanyak 50 total tanggapan berada pada skala sangat baik, sebanyak 720 total tanggapan berada pada skala baik dan 510 total tanggapan berada pada skala cukup. Dengan rentang skor 1244 – 1511 masuk dalam kategori cukup.

Berdasarkan pendapat G.R Terry dalam Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai Koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan pendapat yang dijelaskan tersebut dikarenakan koordinasi penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan dilaksanakan untuk menyediakan waktu dan mengarahkan seluruh OPD untuk dapat membantu penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan yang berkualitas meskipun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa OPD yang tidak komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat.

Tanggapan responden sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan koordinasi kami sudah melakukan secara maksimal untuk meningkatkan serta mempercepat penyusunan LPPD untuk dapat dikumpulkan tepat waktu dengan kualitas yang baik. Kami juga berupaya melaksanakan koordinasi kepada seluruh OPD dan menjembatani OPD dalam mengumpulkan dan meningkatkan capaian kinerja OPD dikarenakan LPPD ini merupakan cerminan dari raport Bupati Pelalawan.”

Hal ini diperkuat wawancara dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan yang merupakan ketua tim penyusunan LPPD, yang menyatakan bahwa:

“Tujuan utama dari penyusunan LPPD adalah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini kami Sekretariat Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan yang salah satu tugasnya adalah sebagai kompilasi dan penyingkapan data..”

Jadi koordinasi penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi terutama dari kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi dan kontinuitas perencanaan pada masing-masing OPD agar penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan dapat jauh lebih baik lagi dan berkualitas sehingga menunjukkan capaian kinerja yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya dikarenakan data capaian kinerja yang terdapat dalam indikator kinerja kunci LPPD memerlukan data dari berbagai OPD maka pelaksanaan koordinasi harus lebih baik lagi untuk mendapatkan data yang valid dan lengkap dari masing-masing OPD terkait, dan disinilah peran koordinator dalam mengkoordinasikan seluruh OPD diuji apakah pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik atau tidak.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi penyusunan LPPD Kabupaten Pelalawan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang dijadikan dasar oleh penulis dalam penelitian ini, pelaksanaan koordinasi ini terdiri dari Tim Penyusun LPPD Kabupaten yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan dan mengkoordinasikan seluruh OPD. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) indikator yaitu:

1. Komunikasi, melalui indikator ini disampaikan tentang informasi-informasi yang disampaikan mengenai penyusunan LPPD kepada OPD sudah sering dilakukan baik secara lisan melalui pertemuan, tulisan melalui surat serta melalui teknologi informasi.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi, melalui indikator ini dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan dan ketaatan OPD masih harus ditingkatkan meskipun sudah berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapat OPD yang beberapa aparturnya kurang memahami dengan tujuan dari penyusunan LPPD sehingga kepedulian terhadap hasil penyusunan LPPD masih kurang.
3. Kompetensi partisipan, tingkat keterlibatan pejabat-pejabat pada OPD belum merata hal tersebut diakibatkan terjadinya mutasi yang

dilakukan pada awal tahun pejabat yang baru masih ada yang merasa bahwa data tersebut bukan tanggung jawabnya melainkan tanggung jawab pejabat sebelumnya.

4. Kesepakatan, komitmen dan Insentif koordinasi, yang terjadi adalah masih ditemukan OPD yang tidak melaksanakan hasil koordinasi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan hal ini mengakibatkan terhambatnya penyusunan LPPD Kabupaten.
5. Kontinuitas perencanaan, yang terjadi adalah capaian kinerja dari OPD dari tahun ke tahun masih ditemukan tidak meningkat atau sama seperti tahun sebelumnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Tim penyusun LPPD Kabupaten untuk dapat membuat *reward dan punishment* terhadap OPD untuk memotivasi pada setiap OPD agar meningkatkan capaian kinerjanya. Selanjutnya juga dapat membuat peringkat bagi seluruh OPD mengenai tentang OPD yang memiliki progres terbaik dari tahun ke tahun.
2. Disarankan kepada seluruh OPD untuk dapat menyiapkan data-data terkait penyusunan LPPD secara triwulan atau semester sehingga membantu OPD apabila terjadi mutasi jabatan data tersebut sudah siap atau hanya mengkonfirmasi bahwa data tersebut merupakan data yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo (2011) Manajemen Keuangan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agustino, Leo (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Alkin, M.C. (1985). Guide For Evaluation Decision Makers. Beverly Hills: Sage Publication
- Ananda, Rusydi dan Tien Rafida. 2017. Pengantar Evaluasi Program Pendidikan. Medan: Perdana Publishing.
- Anggara, Sahya, 2012. Ilmu administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arikunto, S., dan Jabar, C.S.A. 2009. Evaluasi Program Pendidikan Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Crawford, John. 2000. Ed. 2. *Evaluation of Libraries and Information Services*. London : Aslib, *the association for information management and information management international*.
- Cresswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Djaali, Puji Mulyono, dan Ramly. 2000. Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PPs UNJ.
- Dunn, William, N. 2012. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada Univesity Press

- Handoko, T. Hani. 2009, Manajemen, Yogyakarta: Penerbit BPEE.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kumar, Ranjit. 2011. Research Methodology: A Step-by-step Guide for Beginners. London: Sage Publications
- Manullang, M. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Merriam, Sharan B. 2009. Qualitative Research : A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass
- Mulyadi, Mohammad. 2014. Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Publica Institute
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Sawitri. S. 2007. Evaluasi Program Pelatihan Ketrampilan Membuat Hiasan Busana dengan Teknik Pemasangan Payet Bagi Pemilik dan Karyawan Modiste di Kecamatan Gunungpati Semarang. Yogyakarta: PPs UNY.
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Siagian. Sondang P. 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2011. Studi tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

- Siswanto, H. B. 2005. *Pengantar Manajemen*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Soewarno Handayaniingrat. 1989. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Masagung
- Soewarno Handayaniingrat. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Subarsono, AG. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Wirjana, Bernardine R (2007). *Mencapai Manajemen berkualitas*. Andi. Yogyakarta.
- Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi.

Dokumen Pendukung:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,
LKPD kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan 2016-2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018